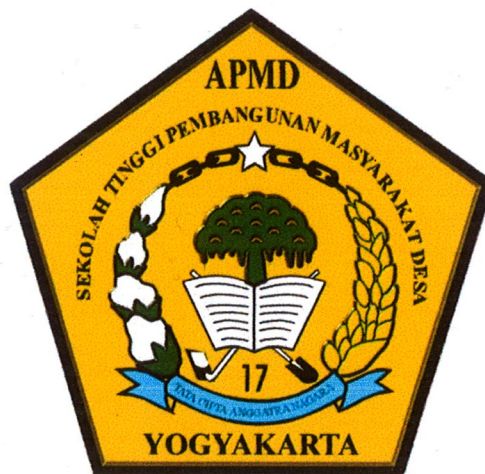


**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

(Studi di Kalurahan Umbulharjo Kapanewon Cangkringan Sleman)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun oleh:

HERDIN LAIA

21520036

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2025



***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

(Studi di Kalurahan Umbulharjo Kapanewon Cangkringan Sleman)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun oleh:

HERDIN LAIA

21520036

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Pada:



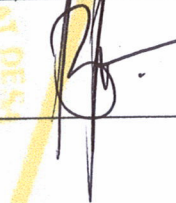
Hari : Kamis

Tanggal : 06 Februari 2025

Jam : 11:30 WIB

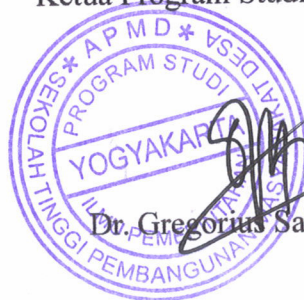
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

| NAMA | TANDA TANGAN |
|---|---|
| 1. <u>Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M. Si.</u> Ketua Penguji/Pembimbing |  |
| 2. <u>Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si.</u> Penguji Samping I |  |
| 3. <u>Analius Giawa, S.IP., M.Si.</u> Penguji Samping II |  |

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herdin Laia

NIM : 21520036

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ***“Collaborative Governance Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Umbulharjo Kapanewon Cangkringan Sleman”*** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular official stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and 'METERAI TEMPEL'. Below the stamp, the alphanumeric code 'BEA98AMX188256174' is printed.

Herdin Laia
21520036

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Herdin Laia

NIM : 21520036

Telp : 085227800480

Email : herdinlaia21@gmail.com

Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu** Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)”

(Studi di Kalurahan Umbulharjo Kapanewon Cangkringan Sleman)

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 17 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Herdin Laia

21520036

MOTTO

**“Keluarga adalah tempat dimana kehidupan
dimulai, dan cinta takkan
pernah berakhir”**

-PENULIS-

**“Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu,
telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita,
supaya kita teguh berpegang pada
pengharapan oleh ketekunan dan
penghiburan dari kitab suci”**

(Roma 15:4)

**“Masa depan bukanlah sesuatu yang kita tunggu,
Itu adalah sesuatu yang kita ciptakan”**

-PENULIS-

**“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi
Kekuatan kepadaku”**

(Filipi 4:13)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala ucapan syukur skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang terkasih yang selama ini telah memberikan dukungan, motivasi, serta memberikan kekuatan sehingga saya bisa dapat menyelesaikan skripsi ini.

- 1) Dengan segala kerendahan hati, ucapan syukur saya mempersembahkan Kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga sampai pada saat ini masih bisa menikmati berkat-Nya yang tidak pernah ada habisnya. Terimakasih roh kudus atas segala berkat dan kasih setia-Mu. Tuhan Yesus baik dan luar biasa.
- 2) Skripsi ini juga saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, bapak Boroli Laia dan mama Yutimani Giawa yang telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa untuk saya. Terimakasih semua doa, dukungan, dan tenaga kalian yang telah saya terima selama ini. Terimakasih untuk semuanya harapan saya semoga kalian berdua sehat selalu, dan doakan anak mu yang baik hati ini semoga menjdi agen perubahan untuk keluarga kita di masa depan.
- 3) Terimakasih saya juga untuk kakek Fatosola Giawa, nenek Amifati Giawa (Almh) dan nenek Minaaci Giawa yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta doa untuk saya sebagai salah satu cucu dari mereka.
- 4) Terimakasih juga untuk bapak sa'a Analis Giawa, S.IP., M.Si, mama sa'a Vaery, bapak sakhi Cosmas Giawa S.IP, mama sakhi Anna, tante Anas Giawa & Priska Giawa, dan abang/kakak sepupu Silvester Kurniawan Halawa & Yusta Asniar Halawa yang telah memberikan saya dukungan, motovasi, serta arahan selama saya dalam menempuh studi di kampus STPMD "APMD" Yogyakarta.
- 5) Terimakasih juga untuk kakak perempuan Clara Wilman Laia, adek perempuan Saveria Helmina Laia, adek laki-laki Yustus Petrus Laia dan Farel yang sering mendukung saya dengan doa serta sejumlah uang yang telah kalian berikan untuk saya.
- 6) Terimakasih juga untuk dosen pembimbing saya Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 7) Terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh Dosen STPMD "APMD" Yogyakarta yang telah memberikan saya ilmu dan pendidikan akademik selama saya menempuh studi dikampus Desa yang Luar bisa ini yang penuh dengan kesabaran dan ketekunan.

- 8) Terimakasih juga untuk seluruh teman-teman saya yang selalu ada untuk saya disaat suka maupun duka yang sudah kita lalui bersama-sama, dan semangat dari kalian sangat berharga bagi saya, khususnya Viki, Tomi Irwandi, Valdo, Okta, Andreas Wijaya.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat, anugerah dan pertolongannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “*COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KALURAHAN UMBULHARJO KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN”. Skripsi ini adalah salah satu syarat akademik untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Secara substansial skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Umbulharjo. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, keterbatasan, baik itu dalam pengalaman dan ilmu pengetahuan serta wawasan dalam berfikir dan menulis. Maka dari itu, apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dimohon untuk kritik dan sarannya. Penulis juga menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP.,M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si. selaku penguji samping 1 (satu) yang telah mengarahkan dan memberikan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si. selaku penguji samping 2 (dua) yang telah mengarahkan dan memberikan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen, serta segenap karyawan Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.

7. Pemerintahan Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, dan seluruh masyarakat Kalurahan Umbulharjo yang telah memberikan izin, ruang, tempat, waktu, dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemerintahan dan pengelolaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik di kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum, dalam memahami pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan UMKM. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Yogyakarta, 31 Januari 2025

Penulis



Herdin Laia

Nim 21520036

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK..... | iv |
| MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| INTISARI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 11 |
| C. Fokus Penelitian..... | 11 |
| D. Tujuan penelitian..... | 11 |
| E. Manfaat penelitian | 12 |
| F. Literatur Review | 13 |
| G. Kerangka Konseptual..... | 27 |
| 1. Governance..... | 27 |
| 2. Collaborative Governance..... | 31 |
| 3. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | 34 |
| H. Metode Penelitian | 41 |
| a) Jenis penelitian | 41 |
| b) Unit analisis..... | 41 |
| c) Teknik pengumpulan data | 41 |
| 1. Wawancara | 43 |
| 2. Observasi..... | 45 |
| 3. Dokumentasi..... | 45 |
| d) Teknik analisis data | 46 |
| 1. Pengumpulan Data..... | 46 |
| 2. Reduksi Data..... | 47 |

| | |
|---|-----|
| 3. Penyajian Data | 47 |
| 4. Penarikan Kesimpulan | 48 |
| BAB II PROFIL KALURAHAN UMBULHARJO, KAPANEWON CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN | 49 |
| A. Sejarah Kalurahan Umbulharjo | 49 |
| B. Kondisi Geografis | 51 |
| C. Kondisi Demografis | 54 |
| 1. Jumlah Penduduk | 54 |
| 2. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia | 56 |
| 3. Data Penduduk Berdasarkan Agama | 56 |
| 4. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan | 57 |
| 5. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 59 |
| D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | 60 |
| BAB III <i>COLLABORATIVE GOVERNANCE</i> DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) | 69 |
| A. Inisiasi Pemerintah Kalurahan Umbulharjo Dalam Pengembangan UMKM | 69 |
| B. Keterlibatan Aktor Non Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM | 77 |
| C. Partisipasi Langsung Dalam Pengembangan UMKM | 84 |
| D. Organisasi Forum Yang Formal Dalam Pengembangan UMKM | 92 |
| E. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Konsensus Dalam Pengembangan UMKM ... | 101 |
| F. Fokus Pada Kebijakan Publik Dalam Pengembangan UMKM | 106 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 113 |
| A. Kesimpulan | 113 |
| B. Saran | 118 |
| DAFTAR PUSTAKA | 120 |
| LAMPIRAN | 123 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Batas wilayah Kalurahan Umbulharjo | 52 |
| Tabel 2.2 Batasan Obintasi Kalurahan Umbulharjo..... | 52 |
| Tabel 2.3 Data Padukuhan wilayah Kalurahan Umbulharjo..... | 53 |
| Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan wilayah dan gender..... | 54 |
| Tabel 2.5 Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia..... | 56 |
| Tabel 2.6 Data Penduduk Berdasarkan Agama..... | 56 |
| Tabel 2.7 Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan | 58 |
| Tabel 2.8 Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 59 |
| Tabel 2.9 Daftar Nama Dan Alamat UMKM Kalurahan Umbulharjo | 63 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----|
| Gambar 2.1 Peta Lokasi UMKM Kalurahan Umbulharjo | 67 |
| Gambar 3.1 Bimbingan Teknis Kerajinan Bambu | 77 |
| Gambar 3.2 Penghargaan Nata Sembada FORKOM UMKM..... | 83 |
| Gambar 3.3 Pelayanan Pendaftaran Produk Halal & BPOM | 100 |

INTISARI

Tata kelola kolaboratif *collaborative governance* menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Umbulharjo, kolaborasi ini sangat penting untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal, terutama di sektor kerajinan, pertanian, dan pariwisata. Meskipun ada potensi tinggi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, tantangan seperti akses pasar yang terbatas dan pengelolaan yang kurang optimal masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak melalui pendekatan kolaboratif diharapkan mampu meningkatkan daya saing, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Inti permasalahan dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo adalah keterbatasan akses pasar dan pengelolaan sumber daya yang belum optimal, yang menghambat potensi ekonomi lokal untuk berkembang secara maksimal. Selain itu, kurangnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kolaboratif untuk mengkaji peran *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo. Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, data dianalisis digunakan untuk memahami *Collaborative Governance* dalam mendorong UMKM.

Hasil dari penelitian ini mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman. Pertama, institusi publik memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem kondusif bagi UMKM dengan kolaborasi yang melibatkan pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Kedua, partisipasi aktor non-pemerintah, terutama FORKOM UMKM, penting dalam memberikan pelatihan dan dukungan akses pasar bagi UMKM, memperkuat ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, partisipasi langsung dari semua pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam menerapkan *collaborative governance* untuk UMKM, menciptakan sinergi untuk pertumbuhan dan keberlanjutan. Keempat, organisasi formal seperti FORKOM UMKM memainkan peran vital dalam koordinasi dan pengembangan UMKM. Kelima, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus melibatkan dialog dan didasarkan pada kebutuhan semua pihak, memastikan keberlanjutan inisiatif pengembangan UMKM. Keenam, kebijakan publik, PERKAL, dan SK terkait UMKM memberikan dasar hukum yang jelas, serta dukungan Badan Perwakilan Kalurahan (BPKal) memperkuat kerjasama untuk memajukan UMKM. Dengan demikian, kolaborasi multi-stakeholder dan dukungan kebijakan berperan kunci dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo, membawa manfaat bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kata kunci : *Collaborative Governance*, Pengembangan UMKM, Pemerintah Kalurahan.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Collaborative governance atau tata kelola kolaboratif mengedepankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak, baik itu pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, dalam mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Kolaborasi ini tidak hanya memfokuskan pada peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga memperkuat kontribusi aktif sektor swasta dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dalam konteks pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, tata kelola kolaboratif ini sangat krusial mengingat adanya beragam potensi ekonomi lokal yang masih belum sepenuhnya dimanfaatkan, terutama di sektor kerajinan, pertanian, dan pariwisata. Potensi-potensi lokal tersebut sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat dikembangkan lebih jauh, baik melalui peningkatan kualitas produk maupun dengan membuka akses yang lebih luas ke pasar regional maupun nasional.

Beberapa potensi ekonomi di Kalurahan Umbulharjo, kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman. Sektor Kerajinan: Kerajinan Bambu dan Anyaman Produk kerajinan berbahan bambu seperti anyaman, peralatan rumah tangga, dan dekorasi memiliki nilai ekonomi tinggi. Kerajinan ini sudah mulai berkembang di beberapa dusun dengan potensi pasar yang menjanjikan jika diberi sentuhan inovasi desain dan pemasaran digital (Salindri et al., 2022). Pada

Sektor Pertanian: Budidaya Salak Pondoh Deskripsi, Salak Pondoh merupakan komoditas unggulan di Sleman, termasuk di Kalurahan Umbulharjo. Potensi ini dapat dimaksimalkan melalui pengolahan hasil seperti keripik salak, sirup salak, atau dodol salak, yang memiliki daya tarik pasar lebih luas (Fish, 2020). Pada Sektor Pariwisata: Wisata Vulkanik dan Desa Wisata, Dekatnya Kalurahan Umbulharjo dengan Gunung Merapi membuka peluang wisata berbasis edukasi vulkanologi dan ekowisata. Desa wisata yang menawarkan pengalaman budaya, kuliner lokal, dan kegiatan outdoor juga memiliki prospek besar (Akasse & Ramansyah, 2023). Sayangnya, pengelolaan dan pemasaran dari potensi ini masih belum maksimal. Di sinilah peran *collaborative governance* menjadi sangat penting, di mana tidak hanya satu pihak yang bertanggung jawab, melainkan semua pihak saling bekerja sama dan memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Sugitanata et al., 2022).

Meskipun Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Sleman memiliki beragam potensi ekonomi yang menjanjikan di sektor kerajinan, pertanian, dan pariwisata, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengelola dan memasarkan potensi tersebut. Kerajinan, budidaya, serta peluang wisata dan ekowisata, semuanya masih terhambat oleh pengelolaan yang tidak optimal dan pemasaran yang kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi yang besar, tanpa adanya tata kelola kolaboratif yang melibatkan semua pihak, upaya untuk memaksimalkan potensi lokal ini akan tetap terhambat, sehingga mengakibatkan hilangnya peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengembangan UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan ini mewajibkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan/atau perusahaan swasta untuk menyediakan minimal 30% dari total luas area komersial, pusat perbelanjaan, atau lokasi strategis lainnya di infrastruktur publik untuk promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.

Dalam skema tata kelola kolaboratif, peran pemerintah Desa sangatlah penting sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai pihak terkait. Pemerintah Desa diharapkan mampu menyusun regulasi yang mendukung pengembangan UMKM serta menyediakan kebijakan yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, pemerintah juga perlu menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung kolaborasi antara sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Sektor swasta dan akademisi juga memegang peranan penting dalam kolaborasi ini. Sektor swasta, misalnya, dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, peningkatan keterampilan, serta menyediakan akses permodalan bagi UMKM yang membutuhkan. Perusahaan-perusahaan besar bisa menjalin kerja sama dengan UMKM dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan, seperti menjadi pemasok produk atau menjadi bagian dari rantai pasok industri yang lebih besar. Akademisi, di sisi lain, bisa memberikan masukan berbasis penelitian dan kajian yang relevan untuk membantu para pelaku UMKM meningkatkan inovasi produk, memperbaiki manajemen bisnis, hingga memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran produk mereka (Emerson K., 2012).

Selain itu, keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas lokal juga tidak boleh diabaikan. Mereka berperan dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat setempat dalam mendukung UMKM. LSM bisa memfasilitasi pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya UMKM bagi perekonomian lokal serta memberikan pelatihan teknis atau bantuan langsung kepada pelaku usaha kecil (Purwanti E., 2020). Dengan adanya partisipasi aktif dari semua pihak, tidak hanya akan tercipta sinergi yang baik, tetapi juga tercipta rasa tanggung jawab bersama dalam mengembangkan dan memajukan UMKM. Secara keseluruhan, *collaborative governance* adalah sebuah pendekatan yang memungkinkan pengembangan UMKM berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Model tata kelola ini mengakui bahwa tidak ada satu pun pihak yang bisa bekerja sendirian untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengembangan UMKM, melainkan membutuhkan kolaborasi dan kerja sama dari berbagai sektor. Kolaborasi yang kuat akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, peningkatan daya saing, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat di Kalurahan Umbulharjo.

Kalurahan Umbulharjo, yang terletak di wilayah rawan bencana di lereng Gunung Merapi, menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam mengembangkan UMKM-nya. Ancaman bencana alam, terutama erupsi Merapi, sering kali mengakibatkan gangguan signifikan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat setempat (Bakri, 2021). Ketika terjadi letusan, dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang ekonomi utama, tetapi juga memengaruhi usaha kecil lainnya seperti perdagangan, pariwisata, dan sektor jasa. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan

ekonomi yang berkelanjutan, di mana pelaku UMKM harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang tidak menentu serta pulih dengan cepat pascabencana.

Meski demikian, Umbulharjo memiliki keunggulan tersendiri, terutama dalam potensi pariwisata alam dan budaya yang belum sepenuhnya tergarap. Dengan lokasi yang berada dekat dengan kawasan wisata Gunung Merapi, Desa ini sebenarnya memiliki daya tarik yang kuat bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara (Satria, 2021). Keindahan alamnya yang khas serta warisan budaya lokal bisa menjadi magnet bagi sektor pariwisata, yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi UMKM di sana. Potensi ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha berbasis pariwisata, seperti penjualan produk kerajinan tangan lokal, kuliner khas, dan layanan akomodasi bagi wisatawan.

Berbagai sektor UMKM di Kalurahan Umbulharjo mencerminkan kekayaan budaya dan sumber daya alam lokal. Kerajinan tangan, misalnya, menjadi salah satu sektor unggulan yang memiliki nilai seni dan kultural tinggi. Produk-produk kerajinan berbahan dasar alam, seperti anyaman bambu, batik, dan ukiran kayu, berpotensi menjadi produk unggulan yang diminati oleh wisatawan (Dewi, 2019). Selain itu, kuliner khas daerah, seperti makanan tradisional berbahan baku lokal, juga memiliki daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Usaha berbasis pertanian pun tak kalah penting, dengan produk-produk seperti sayuran organik, kopi, dan rempah-rempah yang bisa dikembangkan lebih jauh untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Namun, potensi besar ini tidak akan dapat dimaksimalkan tanpa adanya pengelolaan yang efektif. Peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat

sangat diperlukan untuk mendorong perkembangan UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah desa dapat memberikan dukungan melalui penyediaan infrastruktur yang memadai serta kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM, seperti program pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan pemasaran produk. Di sisi lain, sektor swasta dapat berkontribusi dengan menyediakan teknologi yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang kolaborasi dalam distribusi dan promosi produk lokal ke pasar yang lebih luas.

Di era digital seperti sekarang, salah satu elemen krusial yang perlu diperkuat adalah pemanfaatan teknologi digital untuk memasarkan produk-produk UMKM Umbulharjo. Akses ke pasar digital, baik melalui *platform e-commerce*, media sosial, maupun situs web mandiri, dapat membantu pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar mereka secara signifikan. Dengan menggunakan teknologi ini, produk-produk UMKM dari Kalurahan Umbulharjo dapat diakses oleh konsumen di luar wilayah setempat, bahkan hingga tingkat nasional dan internasional. Selain itu, peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan teknologi, manajemen usaha, dan inovasi produk juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa mereka bisa bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, harapannya adalah agar UMKM di Kalurahan Umbulharjo dapat berkembang dengan lebih baik dan stabil. Melalui pendekatan kolaboratif ini, akses ke pasar yang lebih luas bisa terbuka, baik melalui saluran distribusi konvensional maupun jalur digital (Suryani, 2020). Selain itu, dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas

pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan dan mengoptimalkan potensi yang ada, sehingga dapat berkontribusi secara lebih signifikan terhadap perekonomian lokal maupun nasional. Kolaborasi ini akan memperkuat UMKM di Umbulharjo dalam jangka panjang, menciptakan keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat setempat, serta mendorong pertumbuhan yang inklusif dan merata.

Pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo memerlukan strategi yang partisipatif dan melibatkan semua pihak terkait secara aktif. Dalam hal ini, pendekatan kolaboratif atau *collaborative governance* menjadi kunci penting untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan (Putra, 2018). Melalui tata kelola kolaboratif, berbagai tantangan yang selama ini dihadapi oleh para pelaku UMKM, seperti keterbatasan akses pasar, rendahnya kualitas produk, serta kurangnya daya saing, bisa diatasi secara lebih efektif. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, baik dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat itu sendiri, diharapkan solusi yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan

Tantangan utama dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo terletak pada akses pasar yang terbatas. Para pelaku usaha kecil sering kali hanya mampu menjangkau pasar lokal dengan skala yang terbatas, sehingga potensi ekonomi yang lebih besar belum bisa dimaksimalkan (Marchel, 2019). Melalui pendekatan kolaboratif, berbagai pihak dapat bekerja sama untuk memperluas akses pasar bagi produk-produk UMKM ini. Misalnya, pemerintah dapat memberikan dukungan melalui penyelenggaraan pameran produk lokal atau membantu pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital, sehingga mereka dapat memasarkan produk mereka melalui *platform e-commerce* dan menjangkau konsumen di luar wilayah mereka. Dukungan ini tentu saja

membutuhkan kerja sama lintas sektor, di mana pihak swasta, seperti perusahaan teknologi, dapat memberikan pelatihan digitalisasi kepada pelaku UMKM, sementara akademisi dan lembaga penelitian dapat melakukan kajian terkait tren pasar yang relevan.

Selain itu, peningkatan kualitas produk UMKM menjadi salah satu aspek yang tidak kalah penting. Produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM di Kalurahan Umbulharjo, baik dari sektor kerajinan, pertanian, maupun kuliner, sebenarnya memiliki potensi yang besar (A., 2021). Namun, kualitas produk ini perlu terus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan produk dari wilayah lain, baik di pasar domestik maupun internasional. Disinilah pentingnya kolaborasi antara para pelaku usaha dengan pemerintah dan akademisi untuk meningkatkan standar mutu produk. Akademisi, misalnya, dapat memberikan kontribusi dengan menyelenggarakan pelatihan tentang inovasi produk, teknik pengemasan, hingga strategi pemasaran. Pihak pemerintah juga dapat mendorong peningkatan kualitas dengan memberikan sertifikasi atau label mutu bagi produk-produk UMKM yang telah memenuhi standar tertentu, sehingga konsumen semakin percaya pada kualitas produk yang dihasilkan.

Dalam meningkatkan daya saing UMKM, pendekatan kolaboratif juga berperan penting. Daya saing ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas produk, tetapi juga dengan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola bisnis mereka (Sandhi, 2020). Sering kali, pelaku UMKM mengalami kendala dalam hal manajemen bisnis, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga pengembangan jaringan bisnis. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk meningkatkan kapasitas manajerial pelaku UMKM. Pihak swasta bisa terlibat dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan manajemen

bisnis, sementara pemerintah bisa menyediakan program-program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha mereka, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada daya saing mereka di pasar yang lebih luas.

Pada tahun 2023, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) meluncurkan program pelatihan untuk pemilik UMKM setempat. Program ini dimulai dengan survei untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Berdasarkan hasil survei tersebut, pemerintah dan LSM menyusun kurikulum pelatihan yang mencakup manajemen keuangan, pemasaran digital, dan pengembangan produk. Pelatihan dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan narasumber dari berbagai sektor, termasuk akademisi dan praktisi bisnis. Hasilnya, banyak pemilik UMKM melaporkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta beberapa di antaranya mengalami kenaikan penjualan setelah menerapkan strategi pemasaran yang dipelajari. Selain itu, program ini berhasil membangun jaringan antar pelaku UMKM yang saling mendukung dalam memasarkan produk mereka. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya yang membuat tidak semua UMKM dapat berpartisipasi penuh dan perlunya komitmen berkelanjutan dari semua pihak agar program ini dapat berjalan efektif dalam jangka panjang serta untuk mendorong pertumbuhan UMKM khususnya di Kalurahan Umbulharjo.

Pemerintah Kalurahan Umbulharjo melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan UMKM di wilayahnya. Salah satu program yang telah dilakukan adalah penyelenggaraan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pelaku UMKM, dimana pelatihan ini melibatkan anggota Forum

Komunikasi UMKM. Selain itu, pemerintah kalurahan juga memberikan dukungan dalam proses pendaftaran produk untuk mendapatkan sertifikasi halal dan BPOM, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Dengan berbagai program ini, Pemerintah Kalurahan Umbulharjo berharap UMKM di Kalurahan Umbulharjo dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian lokal.

Kolaborasi yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat tidak hanya akan membantu mengatasi tantangan-tantangan yang ada, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi para pelaku UMKM (Purwanti, 2020). Dengan adanya kerja sama ini, potensi-potensi ekonomi lokal yang selama ini belum tergarap secara optimal bisa mulai dikembangkan. Misalnya, sektor pariwisata yang potensial di Kalurahan Umbulharjo bisa menjadi daya ungkit bagi UMKM di sektor kuliner dan kerajinan. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, permintaan terhadap produk-produk lokal akan semakin meningkat, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif pada pendapatan pelaku UMKM. Selain itu, akses ke teknologi digital juga akan membantu UMKM dalam memanfaatkan peluang-peluang baru di era ekonomi digital, seperti menjual produk secara online atau berkolaborasi dengan perusahaan teknologi untuk menciptakan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Sebagai kesimpulan, tata kelola kolaboratif diharapkan dapat menjadi solusi strategis untuk menghadapi berbagai kompleksitas dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo (Emerson K., 2012). Pendekatan ini tidak hanya membantu mengatasi berbagai kendala yang ada, tetapi juga memberikan peluang besar bagi UMKM untuk berkembang lebih pesat dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian lokal. Melalui kerja sama yang baik,

tantangan lokal dapat diatasi, dan potensi ekonomi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pada akhirnya, pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalurahan Umbulharjo.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo?

B. Fokus Penelitian

1. Inisiasi pemerintahan Kalurahan dalam pengembangan UMKM,
2. Keterlibatan aktor non pemerintah dalam pengembangan UMKM,
3. Partisipasi langsung dalam pengembangan UMKM,
4. Organisasi forum yang formal dalam pengembangan UMKM,
5. Pengambilan keputusan berdasarkan konsensus dalam pengembangan UMKM,
6. Fokus pada kebijakan publik dalam pengembangan UMKM .

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan peran pihak pemerintah, sektor swasta, dan Masyarakat terhadap pendekatan *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman.

2. Mendeskripsikan proses kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman dalam pengelolaan UMKM di Kalurahan Umbulharjo.

D. Manfaat penelitian

a) Secara Akademik :

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan pengembangan masyarakat, serta berkontribusi pada pengembangan atau modifikasi teori mengenai *collaborative governance* dan pengembangan UMKM. Selain itu, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi contoh bagi penelitian serupa di masa mendatang, serta hasilnya dapat dijadikan bahan ajar di institusi pendidikan tinggi.

b) Secara Praksis :

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung pengembangan UMKM. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan *collaborative governance*, penelitian ini berpotensi membantu pemberdayaan UMKM di Kalurahan Umbulharjo, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengembangan ekonomi lokal. Temuan dari penelitian ini juga dapat dijadikan model bagi daerah lain yang ingin menerapkan prinsip-prinsip serupa, sehingga praktik terbaik dapat disebarluaskan di tingkat nasional. Pada akhirnya, pengembangan UMKM yang lebih baik melalui kolaborasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup

masyarakat di Kalurahan Umbulharjo, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya.

E. Literatur Review

- a) Artikel yang ditulis oleh M. Dibyorini, A. Sakina, A. Adiwirahayu, dan kolega dengan judul “Manifestasi *Collaborative Governance* : Mengorkestrasi Korporasi Rakyat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)” jurnal *Islamic Manajement And Empowerment Journal* volume 6, nomor 1 tahun 2024, memberikan kontribusi yang signifikan dalam kajian pengelolaan pariwisata berbasis komunitas dengan menyoroti peran strategis Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana BUM Desa di kawasan strategis Borobudur, khususnya Desa Candirejo, dapat mengelola sumber daya lokal dengan pendekatan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga pelestarian budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai institusi desa yang memiliki kewenangan otonom, BUM Desa memainkan peran sentral dalam mengorkestrasi korporasi rakyat untuk memaksimalkan potensi lokal. Perspektif ini memberikan kebaruan dalam melihat bagaimana pengelolaan Desa wisata dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat sebagai elemen kunci dalam keberhasilan pengelolaan pariwisata. Desa Candirejo menjadi contoh sukses yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan pariwisata tidak hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi masyarakat lokal serta kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta.

Pendekatan *collaborative governance* yang diterapkan dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana kolaborasi antara berbagai pihak dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan menyoroti peran BUM Desa dalam pengelolaan Desa wisata yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi antara berbagai pihak untuk mewujudkan pengelolaan pariwisata berkelanjutan dan berkeadilan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya menyeimbangkan pelestarian budaya dan komersialisasi dalam pengembangan pariwisata, serta menerapkan teori *collaborative governance* untuk mengatasi tantangan pembangunan yang ada.

- b) Artikel yang ditulis oleh Pajriyah dan Sulaeman dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Perkembangan Pariwisata Di Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat” Nusantara Hasana Journal halaman 23-32 tahun 2021, membahas penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Senggigi, Kabupaten Lombok. Penelitian ini menyoroti kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengelola sumber daya pariwisata secara berkelanjutan dan optimal. Dengan menggunakan teori *collaborative governance* dari DeSave yang mencakup tujuh indikator, yaitu struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan, kepercayaan, akses terhadap kekuasaan, pembagian akuntabilitas, berbagi informasi, dan akses terhadap sumber daya, penelitian ini memberikan dimensi baru dalam mengevaluasi kolaborasi sektor publik dan swasta. Penerapan indikator ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif untuk menilai keberhasilan kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata. Penelitian ini mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam kolaborasi tersebut.

Salah satu temuan utamanya adalah struktur jaringan yang lemah di antara aktor-aktor yang terlibat dan rendahnya komitmen terhadap tujuan bersama. Hal ini mencerminkan adanya kesulitan dalam mengkoordinasikan berbagai pihak untuk mencapai visi pengembangan pariwisata yang selaras. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti adanya ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya, di mana Dinas Pariwisata memiliki akses yang cukup baik terhadap kekuasaan, namun pembagian sumber daya masih belum merata. Ketimpangan ini tercermin dari pembangunan infrastruktur yang masih kurang optimal, meskipun upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia telah mulai berjalan. Penelitian ini memberikan evaluasi kritis terhadap kurangnya keberhasilan kolaborasi yang maksimal. Rendahnya partisipasi aktor-aktor terkait dalam pengambilan keputusan, minimnya komunikasi, serta kurang optimalnya berbagi informasi menjadi hambatan utama dalam kolaborasi tersebut. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang pentingnya membangun kesepahaman yang lebih kuat di antara para pemangku kepentingan, meningkatkan koordinasi, serta memastikan distribusi sumber daya yang lebih merata untuk mendukung efektivitas kolaborasi. Temuan-temuan ini menjadi kontribusi penting dalam literatur pengelolaan pariwisata, terutama dalam upaya membangun model kolaborasi yang lebih efektif untuk pengembangan destinasi wisata berbasis *collaborative governance*.

- c) Artikel yang ditulis oleh Aqshal Bagoes Avanzar Noegroho dan L. Arif dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Pengembangan UMKM Puduk Di Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik” Jurnal *Publicuho*, volume 5, tahun 2023 membahas penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan

UMKM makanan tradisional, khususnya produk Pudak, di Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pemerintahan kolaboratif dapat diterapkan untuk melestarikan dan mengembangkan produk tradisional agar tetap kompetitif di tengah dominasi makanan modern. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan mengkaji pengembangan UMKM berbasis produk tradisional, yang menjadi konteks relatif jarang diteliti, serta memberikan perspektif baru tentang pentingnya strategi kolaborasi yang adaptif untuk sektor tersebut. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa keterlibatan pelaku UMKM Pudak dalam kolaborasi masih terbatas. Meskipun terdapat upaya kolaborasi antara pemerintah dan stakeholder, dampaknya belum dirasakan secara signifikan oleh pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam implementasi *governance kolaborative*. Temuan ini menjadi bahan evaluasi penting dalam strategi pengembangan UMKM, terutama dalam meningkatkan partisipasi aktif pelaku UMKM dalam program kolaborasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh, yang mencakup tiga elemen utama: dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, dan dampak serta adaptasi kolaborasi. Penerapan teori ini memberikan kerangka analitis yang mendalam untuk mengevaluasi kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan stakeholder. Kebaruan lain yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah kritik terhadap kurangnya sosialisasi dan evaluasi kolaborasi, yang menjadi faktor utama mengapa pelaku UMKM belum merasakan dampak nyata dari program-program yang dijalankan. Kurangnya komunikasi dan keterlibatan pelaku UMKM dalam berbagai tahap kolaborasi dianggap sebagai hambatan yang perlu segera diperbaiki. Penelitian ini juga

menyoroti pentingnya evaluasi kolaborasi yang lebih intensif untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan komunikasi, keterlibatan langsung, dan pembenahan distribusi informasi dalam setiap tahap pengembangan program. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti tantangan dalam penerapan *collaborative governance* di sektor UMKM tradisional dan memberikan kontribusi baru dalam literatur dengan menawarkan strategi pengembangan model kolaborasi yang lebih efektif dan adaptif untuk mendukung pelestarian serta pengembangan produk makanan tradisional.

- d) Artikel yang ditulis oleh N. Faidati dan N. Muthmainah dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Pengembangan UMKM Di Era Industri” jurnal Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, volume 3, tahun 2018 membahas penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM di era revolusi industri 4.0, dengan fokus pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini memberikan kebaruan dengan mengkaji bagaimana kolaborasi antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mempercepat adaptasi UMKM terhadap transformasi digital yang dihadirkan oleh revolusi industri 4.0. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus intrinsik, penelitian ini memberikan analisis mendalam terhadap fenomena kolaborasi di tingkat lokal, sehingga menghasilkan pemahaman kontekstual mengenai dinamika kolaborasi antar aktor dalam pengembangan UMKM di DIY. Salah satu temuan utama penelitian ini adalah bahwa penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM di DIY belum optimal. Hambatan seperti tumpang tindih program dan kelompok

sasaran mengakibatkan ketidakefektifan kolaborasi, sehingga membuka ruang refleksi lebih dalam untuk memetakan peran aktor yang lebih jelas. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemetaan aktor dalam kolaborasi untuk mendukung UMKM dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Identifikasi aktor yang terlibat, seperti pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat sipil, menjadi poin penting dalam menentukan kontribusi mereka masing-masing untuk memperkuat UMKM dalam proses transformasi digital. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam literatur *collaborative governance* dengan menekankan pada penguatan UMKM sebagai sektor vital dalam perekonomian Indonesia. Dengan menggambarkan peta kolaborasi multi-stakeholder di tingkat lokal, penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kerja sama lintas sektor dapat mempercepat kesiapan UMKM dalam mengadaptasi teknologi digital. Penekanan pada hambatan implementasi kolaborasi, seperti kurangnya koordinasi dan efektivitas program, juga memberikan wawasan baru untuk perbaikan strategi pengembangan UMKM di era revolusi industri 4.0. Kesimpulan dari penelitian ini membuka peluang untuk kajian lebih lanjut mengenai efektivitas kolaborasi dalam mendukung transformasi industri di tingkat lokal.

- e) Artikel yang ditulis oleh Nur Ambia Arma dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Pengembangan *Smart Village* Desa Pangandaran” jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, volume 10, tahun 2023 membahas penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan *smart village* di Desa Pangandaran. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan mengeksplorasi dinamika kolaborasi antar aktor dalam pembangunan desa pintar, meskipun terdapat kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan.

Salah satu temuan utama adalah evaluasi terhadap penerapan model penta helix, yang melibatkan lima aktor utama: akademisi, pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan media. Namun, penelitian ini menemukan bahwa akademisi belum dilibatkan secara optimal dalam pengembangan *smart village*, meskipun mereka berperan penting dalam penelitian, inovasi, dan perencanaan berbasis pengetahuan. Temuan ini memberikan kontribusi penting untuk memperbaiki model kolaborasi dalam konteks pembangunan desa pintar. Penelitian ini juga mengidentifikasi tiga produk utama yang muncul dari pengembangan *smart village* di Desa Pangandaran, yaitu *smart governance*, *smart society*, and *smart economy*. Produk-produk ini mencerminkan implementasi tata kelola cerdas, peningkatan kualitas masyarakat, serta pengembangan ekonomi berbasis teknologi. Selain itu, penelitian ini memetakan secara mendalam peran aktor-aktor yang terlibat, seperti pemerintah desa, PT. Telkom, kementerian desa, media massa, dan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan aktor ini sudah cukup signifikan, namun kurangnya kontribusi akademisi menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan desa pintar yang lebih komprehensif. Dengan memberikan analisis terhadap dinamika kolaborasi antar aktor dan mengevaluasi hasil yang dicapai, penelitian ini memperkaya literatur tentang *collaborative governance* dalam pengembangan *smart village*. Penekanan pada pentingnya peran akademisi dalam membangun desa pintar berbasis teknologi dan pengetahuan memberikan wawasan baru yang relevan untuk implementasi model penta helix di masa depan. Kesimpulannya, penelitian ini merekomendasikan adanya perbaikan dalam strategi kolaborasi dengan melibatkan akademisi secara lebih

strategis untuk memperkuat fondasi teknologi dan inovasi dalam pengelolaan desa berbasis digital.

- f) Artikel yang ditulis oleh H. Ibrahim dengan judul “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pendekatan Inovasi Sosial Dan *Collaborative Governance*” jurnal ilmu dan budaya, volume 43, tahun 2022 menghubungkan pemberdayaan UMKM dengan inovasi sosial sebagai strategi untuk memperkuat ekonomi nasional pasca-pandemi COVID-19. Penelitian ini memberikan wawasan baru dengan melihat UMKM tidak hanya sebagai pendorong ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari inovasi sosial yang mampu mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran UMKM dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan mendorong pemerataan pembangunan ekonomi melalui efek pengganda (*multiplier effect*) yang lebih luas, baik dalam penciptaan lapangan kerja maupun pemerataan ekonomi. Kebaruan lainnya adalah penggunaan teknologi informasi dan media sosial sebagai katalisator inovasi, yang memungkinkan distribusi informasi lebih cepat, kolaborasi antar pelaku ekonomi, serta perluasan pasar UMKM di era digital. Penelitian ini juga menawarkan wawasan tentang kolaborasi antar sektor, khususnya pemerintah, swasta, dan organisasi lainnya, dalam membangun model kolaboratif yang lebih terstruktur di level kebijakan. Pengembangan model kolaboratif berbasis kelembagaan menjadi salah satu kontribusi penting dari penelitian ini, di mana berbagai aktor ekonomi dilibatkan untuk mendukung pemberdayaan UMKM dalam skala nasional. Dengan menggabungkan pendekatan teknologi, media sosial, dan kolaborasi antar aktor, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan

dalam merancang model pemberdayaan UMKM yang inklusif, berkelanjutan, dan relevan untuk mempercepat pemulihan ekonomi setelah pandemi.

- g) Artikel yang ditulis oleh J. A. Debby, R. Macella, dan tim dengan judul “Pelaksanaan *Collaborative Governance* Dalam Peningkatan Perekonomian Desa Mojomalang Melalui Penguatan UMKM” jurnal *dinamika governance* jurnal ilmu administrasi, volume 13, tahun 2023 mengkaji penerapan *collaborative governance* dalam penguatan UMKM untuk meningkatkan perekonomian Desa Mojomalang, yang memiliki tantangan geografis dan sosial-ekonomi spesifik. Salah satu kebaruan penelitian ini adalah analisis tentang bagaimana kondisi geografis, seperti kekurangan air selama musim kemarau, dan pergeseran aktivitas ekonomi warga dari bercocok tanam menjadi buruh pabrik, memengaruhi dinamika UMKM. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi UMKM di desa ini, meliputi minimnya modal usaha, kurangnya pemahaman tentang pengelolaan bisnis, keterbatasan inovasi produk, serta kesulitan dalam pemasaran. Pengungkapan hambatan ini memperkaya literatur terkait pengembangan UMKM di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan sumber daya. Kebaruan lain terletak pada analisis penerapan *collaborative governance* yang menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah desa dalam perumusan dan implementasi kebijakan penguatan UMKM. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa kolaborasi yang dilakukan masih kurang deliberatif, sehingga perlu peningkatan musyawarah untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercipta kerja sama yang lebih inklusif dan efektif. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk penguatan UMKM melalui diseminasi pengetahuan tentang pengolahan produk unggulan dan penggunaan

teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas serta inovasi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya analisis aktor lokal, seperti pemerintah desa, pelaku UMKM, pengelola BUM Desa, dan masyarakat, dalam penerapan *collaborative governance*. Fokus pada keterlibatan aktor-aktor lokal memberikan wawasan baru tentang bagaimana kolaborasi dapat berjalan lebih optimal di tingkat desa. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menawarkan solusi berbasis potensi lokal dan teknologi untuk mengembangkan ekonomi desa yang mandiri melalui pendekatan kolaboratif.

- h) Artikel yang ditulis oleh S. Sari dengan judul “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis *Collaborative Governance* Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu” jurnal manajemen dan perbankan syariah, volume 6, tahun 2024 mengkaji strategi pengembangan UMKM berbasis *collaborative governance* di Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, yang memiliki karakteristik usaha mikro dengan *omzet* tahunan antara Rp37 juta hingga Rp198 juta. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi dinamika usaha mikro di pedesaan, khususnya tantangan yang dihadapi pelaku UMKM. Beberapa kendala utama yang terungkap meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya inovasi teknologi dan produk, ketiadaan mitra kerja, serta kurangnya modal usaha. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut dalam menciptakan solusi berbasis *collaborative governance*. Penelitian ini adalah penjelasan rinci tentang bentuk kolaborasi pemerintah yang terintegrasi dan kontekstual, seperti program pembinaan melalui pelatihan usaha, pendampingan dalam mencari mitra kerja, pemberian

bantuan modal, dan penciptaan iklim usaha yang mendukung, termasuk kemudahan perizinan. Contoh inovasi seperti program Jabat Erat yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan bagaimana kolaborasi pemerintah dapat diterapkan secara efektif dan beradaptasi dengan kebutuhan lokal. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bagaimana pendekatan *collaborative governance* dapat mengatasi kendala spesifik UMKM di pedesaan, seperti keterbatasan teknologi dan akses modal. Penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa UMKM yang mengikuti prosedur kolaboratif menunjukkan peningkatan kinerja usaha. Fokus pada hasil nyata dari program-program kolaborasi menegaskan dampak positif pendekatan ini terhadap pengembangan UMKM. penelitian ini memberikan wawasan baru tentang penerapan *collaborative governance* dalam konteks pedesaan. Dengan fokus pada kendala spesifik pelaku UMKM, bentuk kolaborasi yang terintegrasi, dan dampak langsung dari program pemerintah, penelitian ini menjadi referensi penting bagi pengembangan UMKM di daerah serupa.

- i) Artikel yang ditulis oleh Handoko Dwi Susantyo dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Di Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan” jurnal Adhikari, volume 2, tahun 2022 mengkaji penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan kewirausahaan terpadu di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menyoroti dinamika pengembangan kewirausahaan di wilayah perkotaan yang kompleks, di mana banyak aktor terlibat dan tantangan sosial-ekonomi yang beragam. Salah satu kebaruan penelitian ini adalah analisis mendalam terhadap faktor-faktor penghambat dan

pendukung dalam proses *collaborative governance*, yang meliputi masalah kebijakan dan struktur tata kelola yang belum optimal, keterbatasan pertukaran informasi antaraktor, serta minimnya kepercayaan antara peserta kolaborasi. Penelitian ini juga menawarkan solusi strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, seperti penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap tahapan program, pelaksanaan monitoring dan evaluasi bersama, serta edukasi kepada masyarakat untuk mengubah paradigma pemberdayaan ekonomi. Selain itu, peneliti juga mendeskripsikan peran spesifik dan terstruktur dari berbagai aktor yang terlibat dalam kolaborasi, seperti Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PMPTSP), Satuan Pelaksana Perindustrian Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan, serta Bank DKI, yang menunjukkan bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat mendukung pengembangan kewirausahaan terpadu. Metodologi induktif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses kolaborasi dan cara aktor-aktor bekerja sama dalam mencapai tujuan pengembangan kewirausahaan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menyediakan strategi operasional yang kontekstual, deskripsi peran aktor yang terstruktur, serta pengembangan metode kolaborasi berbasis pengawasan dan edukasi masyarakat, yang dapat dijadikan panduan untuk implementasi program serupa di daerah lain.

- j) Artikel yang ditulis oleh K. Dan dan M. dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Berau) jurnal Neraca Managemen Ekonomi, volume 3, tahun 2024 tentang *collaborative governance* dalam pengembangan

UMKM di Kabupaten Berau memberikan wawasan baru tentang bagaimana proses kolaborasi dilakukan secara sistematis untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi tahapan kolaborasi yang terdiri dari *Assessment, Initiation, Deliberation, and Implementation*, yang belum banyak dibahas secara rinci dalam penelitian sebelumnya di wilayah lain. Salah satu kebaruan utama dalam penelitian ini adalah penekanan pada peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (*Diskoperindag*) sebagai mitra kolaborasi strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator dan regulator, tetapi juga aktif menjalin komunikasi, menerima masukan, dan melibatkan sektor swasta, seperti PT Berau Coal, dalam pengembangan UMKM. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara sektor pemerintah dan swasta, dengan PT Berau Coal berperan sebagai mentor dan penyedia pelatihan untuk UMKM. Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana integrasi lintas-sektor dapat menciptakan ekosistem kolaborasi yang efektif dan inovatif. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan pentingnya komitmen bersama dalam tahap *assessment*, yang menjadi fondasi keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan pelaku UMKM. Temuan lainnya yang relevan adalah bagaimana metode pelatihan, komunikasi terbuka, dan penerimaan usulan dari UMKM menjadi elemen penting dalam konteks lokal Kabupaten Berau, memberikan perspektif baru dalam implementasi *collaborative governance* di Daerah serupa.

Literatur review tersebut menunjukkan beragam pendekatan dan tantangan dalam penerapan *collaborative governance* untuk pengembangan UMKM di berbagai konteks, baik di pedesaan maupun perkotaan.

Penelitian-penelitian tersebut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM. Misalnya, penelitian oleh M. Dibyorini et al. (2024) menyoroti peran BUM Desa dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas, sementara penelitian oleh Pajriyah dan Sulaeman (2021) mengidentifikasi tantangan dalam kolaborasi di Kawasan Senggigi. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan dengan judul *Collaborative Governance* dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman berfokus pada konteks lokal yang spesifik, yaitu Kalurahan Umbulharjo. Perbedaan utama terletak pada fokus geografis dan konteks sosial-ekonomi yang unik di Cangkringan, yang mungkin menghadirkan tantangan dan peluang berbeda dibandingkan dengan daerah yang diteliti sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi untuk mengidentifikasi elemen-elemen spesifik dari kolaborasi yang diperlukan dalam konteks lokal, seperti peran Pemerintah kalurahan dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang dapat memberikan kontribusi baru terhadap literatur yang ada. Dalam literatur yang ada, posisi peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengisi celah yang ada dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kolaboratif di Kalurahan Umbulharjo. Peneliti berkomitmen untuk mengeksplorasi bagaimana kolaborasi antara pemerintah kalurahan, sektor swasta, dan masyarakat dapat dioptimalkan untuk mendukung pengembangan UMKM secara efektif serta menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan dan praktik kolaboratif di daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

F. Kerangka Konseptual

1. *Governance*

Governance adalah proses dan cara pengelolaan urusan publik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu negara (Mahmud, 2013). *Governance*, atau tata kelola, adalah konsep yang merujuk pada proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan oleh pemerintah, organisasi, maupun sektor swasta yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. *Governance* bukan hanya mengenai bagaimana kebijakan disusun, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dan dipantau secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks yang lebih luas, *governance* melibatkan interaksi yang terstruktur antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta. yang saling berperan dalam membentuk keputusan yang berdampak pada kehidupan publik. *Governance* melibatkan tiga elemen utama: proses melalui mana pemerintah dipilih, dipantau, dan diganti; kapasitas pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan mengimplementasikannya secara efektif; serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara dan institusi yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi di dalamnya (Arimal, 2023).

Dalam pandangan ini, *governance* tidak terbatas pada aspek formal pemerintahan saja, tetapi juga pada mekanisme yang memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan *rule of law* yang kuat dalam pengambilan Keputusan. Konsep *governance* tidak hanya berfokus pada

pemerintah sebagai aktor utama, tetapi juga mengakui peran penting masyarakat sipil dan sektor swasta. Dengan melibatkan berbagai aktor, *governance* mengharuskan adanya mekanisme kolaborasi dan koordinasi yang kuat di antara berbagai pihak. Dalam konteks tata kelola yang baik atau *good governance*, prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan responsivitas menjadi sangat penting. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat luas dan dapat di pertanggungjawabkan. *Transparency International*, misalnya, menekankan bahwa transparansi dalam *governance* adalah salah satu elemen kunci untuk mengurangi korupsi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Hardlife & Zhou, 2013). Tanpa transparansi, masyarakat sulit untuk memantau dan menilai kebijakan yang diterapkan, sehingga dapat memunculkan ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, *governance* yang baik selalu berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa segala informasi kebijakan dapat diakses secara terbuka oleh publik.

Dalam praktiknya, *governance* dapat diterapkan di berbagai tingkat, mulai dari tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Di tingkat lokal, *governance* memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas layanan publik. Misalnya, Pemerintah Daerah sering kali memerlukan tata kelola yang baik dalam menjalankan program-program pembangunan, di mana keterlibatan masyarakat lokal sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran dan efektif.

Governance di tingkat nasional lebih kompleks, karena melibatkan koordinasi berbagai lembaga negara serta interaksi antar wilayah. Tantangan yang sering muncul di tingkat nasional termasuk kesenjangan kebijakan antar wilayah, kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik, serta pengelolaan sumber daya yang efisien. Sementara itu, di tingkat internasional, *governance* mencakup perjanjian dan kerjasama antara Negara dalam menghadapi isu-isu global seperti perubahan iklim, perdagangan, keamanan, dan hak asasi manusia. Tata kelola internasional ini semakin relevan dalam era globalisasi, di mana keputusan suatu negara dapat berdampak luas pada negara-negara lain. Oleh karena itu, *governance* di tingkat internasional sering melibatkan organisasi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang berperan dalam mediasi dan pengaturan standar global.

Governance, dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya tentang peraturan dan prosedur, tetapi juga budaya dan nilai-nilai yang membentuk institusi dan masyarakat. Menurut Fukuyama (2013), *governance* adalah kemampuan negara dan institusinya untuk menciptakan dan memelihara tatanan sosial dan ekonomi yang stabil. Di sinilah pentingnya kapasitas kelembagaan dalam *governance*, di mana Pemerintah harus memiliki kapasitas untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan. *Governance* yang baik memungkinkan terciptanya sistem yang resilient dan adaptif terhadap perubahan serta krisis, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kelembagaan yang kuat dalam *governance* memastikan adanya stabilitas dan

ketahanan dalam menghadapi tantangan, sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, konsep *governance* semakin berkembang dan beradaptasi dengan dinamika masyarakat dan tantangan global (Sari, 2020). Dengan pendekatan yang melibatkan berbagai aktor dan prinsip *good governance*, tata kelola yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjaga kepercayaan publik terhadap institusi, serta mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Di masa depan, *governance* diharapkan terus mengedepankan prinsip keterbukaan, keadilan, dan kolaborasi untuk menciptakan tata kelola yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat global (Prasetyo, 2021). *Governance* adalah kerangka kerja dan proses yang melibatkan berbagai actor pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan pengelolaan sumber daya. *Governance* tidak hanya terbatas pada peran formal pemerintah, tetapi juga melibatkan mekanisme kolaborasi dan koordinasi yang memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan *rule of law* yang kuat (Wibowo, 2020). Pada intinya, *governance* bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang efektif, responsif, dan inklusif dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks *good governance*, prinsip-prinsip seperti transparansi, efektivitas, responsivitas, dan keadilan diterapkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nugroho, 2019).

Dengan demikian, tata kelola *governance* adalah proses yang kompleks, yang melibatkan interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan urusan publik, dengan tujuan mencapai tata

kelola yang efektif, responsif, dan inklusif. Prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penegakan hukum, sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kapasitas kelembagaan yang kuat menjadi faktor kunci dalam menciptakan tatanan sosial dan ekonomi yang stabil, serta dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dengan melibatkan berbagai pihak dan mengedepankan kolaborasi, tata kelola diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjaga kepercayaan publik terhadap institusi, dan mewujudkan pembangunan yang adil serta berkelanjutan di berbagai tingkat, mulai dari lokal hingga internasional.

2. *Collaborative Governance*

Collaborative governance adalah suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan masalah publik. Pendekatan ini menekankan interaksi dan kolaborasi antara aktor-aktor yang terlibat, dengan karakteristik utama seperti partisipasi multi-pihak, proses terbuka, dan pengambilan keputusan bersama. Dalam *collaborative governance*, semua pihak didorong untuk berpartisipasi secara aktif, sehingga menciptakan transparansi dan komunikasi yang baik. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan dan relevan bagi semua pemangku kepentingan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan situasi dan kebutuhan yang muncul selama proses kolaborasi Brison, J & Crosby, B (2014).

Collaborative governance, sebagaimana diuraikan oleh Ansell dan Gash dalam jurnal Habibah (2021) adalah suatu pendekatan dalam tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor publik maupun nonpemerintah, dalam proses pembuatan kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan konsensus dan kolaborasi dalam mengatasi masalah publik, dengan menekankan enam kriteria utama yaitu, inisiasi oleh institusi publik, keterlibatan aktor nonpemerintah, partisipasi langsung dalam pembuatan kebijakan, organisasi forum yang formal, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, dan fokus pada kebijakan publik. Dari uraian yang disampaikan, mengacu pada beberapa elemen penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Berikut ini adalah penjelasan singkat untuk masing-masing poin tersebut, yaitu: yang pertama adalah Inisiasi oleh institusi publik artinya sebuah proses pembuatan kebijakan pada umumnya dimulai oleh lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk menangani isu-isu tertentu. Kedua, keterlibatan aktor nonpemerintah melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah, seperti organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal, agar berbagai sudut pandang dan kepentingan dapat terwakili. Ketiga, Partisipasi langsung dalam pembuatan kebijakan yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan, contohnya melalui konsultasi publik atau forum diskusi. Keempat, Organisasi forum yang formal, membangun platform resmi untuk dialog antara pemangku kepentingan, yang memungkinkan pembahasan isu-isu kebijakan dengan cara yang sistematis. Kelima, Pengambilan keputusan berdasarkan konsensus yang artinya mengutamakan kesepakatan di antara berbagai pihak sebagai landasan untuk

keputusan, guna menciptakan legitimasi dan dukungan yang lebih luas terhadap kebijakan yang dihasilkan. Dan yang keenam adalah fokus pada kebijakan publik yang artinya mengarah pada isu-isu yang berpengaruh pada masyarakat luas dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan publik.

Dalam konteks ini, *collaborative governance* berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan "kepemilikan bersama" terhadap masalah yang dihadapi. Hal ini penting karena berbagai aktor mungkin memiliki perspektif yang berbeda mengenai suatu isu, dan *collaborative governance* berperan sebagai mediator untuk membangun pemahaman yang sama. Dengan demikian, forum ini tidak hanya berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga untuk mengakui dan menghargai legitimasi masing-masing aktor yang terlibat.

Sejalan dengan pendapat Donahue dan Zeckhauser (2011) serta Holzer et al. (2012), *collaborative governance* menciptakan kondisi di mana pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Keberhasilan kolaborasi ini bergantung pada kesadaran para aktor akan keterbatasan masing-masing dan komitmen mereka untuk menjalin hubungan yang lebih erat. Secara keseluruhan, *collaborative governance* dapat dipahami sebagai proses yang melibatkan jejaring multiorganisasi lintas sektoral untuk mencapai kesepakatan bersama dan keputusan yang saling menguntungkan. Dalam interaksi ini, setiap aktor memiliki kedudukan yang setara, sehingga menciptakan suasana kolaboratif yang egaliter dalam mencapai tujuan bersama.

Dengan kata lain, *collaborative governance* merupakan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta tidak hanya bergantung pada

kesepakatan formal, tetapi juga pada kesadaran dan pengakuan terhadap keterbatasan masing-masing aktor. Dalam proses ini, penting bagi semua pihak untuk memiliki komitmen yang kuat dalam membangun hubungan yang saling mendukung dan saling menghargai. Dengan menciptakan jejaring multiorganisasi yang melibatkan berbagai sektor, *collaborative governance* memungkinkan tercapainya keputusan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, di mana setiap aktor berkontribusi secara setara. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses interaksi yang egaliter dan partisipatif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dan legitimasi di antara semua pihak yang terlibat.

3. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha-usaha kecil ini. UMKM memiliki peranan krusial dalam perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Faktor utama dalam pengembangan UMKM antara lain adalah pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelaku usaha, akses ke pembiayaan melalui lembaga keuangan dan program pemerintah, serta strategi pemasaran yang efektif untuk memperluas pasar. Selain itu, penting untuk mendorong inovasi dan penerapan teknologi guna meningkatkan daya saing produk, di samping memperkuat kemitraan dan jaringan yang dapat memperluas akses pasar. Regulasi dan kebijakan yang mendukung juga sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif

bagi pertumbuhan UMKM. Fokus pada aspek-aspek ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

UMKM merupakan jenis usaha yang diakui secara resmi, dengan ciri-ciri tertentu yang ditentukan oleh ukuran dan skala operasionalnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, klasifikasi UMKM diatur sebagai berikut:

a. Usaha Mikro

Kekayaan Bersih : Maksimal Rp 50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan).

Omzet Tahunan : Tidak lebih dari Rp 300.000.000,-.

Jumlah Karyawan : Biasanya kurang dari 10 orang.

b. Usaha Kecil :

Kekayaan Bersih : Antara Rp 50.000.000,- hingga Rp 500.000.000,-.

Omzet Tahunan : Antara Rp 300.000.000,- hingga
Rp 2.500.000.000,-.

Jumlah Karyawan : Sekitar 10 hingga 19 orang.

c. Usaha Menengah

Kekayaan Bersih: Antara Rp 500.000.000,- hingga Rp
10.000.000.000,-.

Omzet Tahunan: Antara Rp 2.500.000.000,- hingga Rp
50.000.000.000,-.

Jumlah Karyawan: Sekitar 20 hingga 99 orang.

Peran UMKM dalam Ekonomi

Menurut Syafii, (2020) UMKM memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian suatu negara, antara lain:

1. Penciptaan Lapangan Kerja : UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Di Indonesia, sektor ini menyerap lebih dari 97% tenaga kerja, sehingga berkontribusi pada pengurangan pengangguran.
2. Peningkatan Pendapatan : UMKM memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan masyarakat, baik melalui gaji yang dibayarkan kepada karyawan maupun keuntungan yang diperoleh pemilik usaha.
3. Inovasi dan Kreativitas : UMKM seringkali menjadi pelopor dalam menciptakan produk dan layanan baru. Mereka lebih fleksibel dalam beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen.
4. Pembangunan Ekonomi Lokal : UMKM berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan menciptakan nilai tambah.

Menurut Hendratmoko, (2015) terdapat Jenis Usaha UMKM

UMKM dapat beroperasi di berbagai sektor, di antaranya:

1. Makanan dan Minuman : Usaha kuliner, seperti restoran, kafe, warung, dan usaha makanan ringan. Sektor ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap makanan unik dan sehat.
2. Fashion dan Kerajinan : Usaha di bidang fashion, seperti pakaian, aksesoris, dan kerajinan tangan. Banyak pelaku UMKM dalam sektor

ini yang memanfaatkan platform online untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

3. Agribisnis : Usaha yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, dan peternakan. UMKM di sektor ini sering kali mengolah produk lokal menjadi barang bernilai tambah.
4. Jasa : Usaha yang menawarkan layanan, seperti salon, jasa kebersihan, dan layanan teknologi informasi. Sektor jasa juga memberikan banyak peluang bagi pelaku UMKM.

Menurut Prasetyo, (2021) terdapat tantangan yang Dihadapi UMKM, antara lain :

1. Akses Pembiayaan: Banyak UMKM kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan formal. Mereka sering dianggap berisiko tinggi, sehingga sulit untuk mendapatkan pinjaman.
2. Persaingan Pasar: UMKM sering kali menghadapi persaingan yang ketat dari usaha besar dan asing. Mereka perlu berinovasi agar tetap relevan di pasar.
3. Pemasaran dan Branding: Banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya pemasaran dan branding. Tanpa strategi pemasaran yang efektif, produk mereka sulit dikenal oleh konsumen.
4. Keterbatasan Sumber Daya: UMKM sering kali memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur, yang dapat menghambat pertumbuhan mereka.

Inovasi dan teknologi memiliki peran krusial dalam kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemanfaatan teknologi memungkinkan UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi proses bisnis dan mengelola data secara lebih efektif. Salah

satu contoh penerapan teknologi yang penting adalah *e-commerce*, yang memberi kesempatan bagi UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional, serta memperkuat visibilitas produk melalui strategi pemasaran digital.

Inovasi dan teknologi, termasuk penggunaan teknologi digital dan *e-commerce*, merupakan faktor utama dalam meningkatkan daya saing, efisiensi, dan pertumbuhan UMKM (Hidayat, 2019). Dengan memanfaatkan teknologi, UMKM tidak hanya mampu bertahan di pasar yang kompetitif, tetapi juga dapat tumbuh dan memberikan kontribusi yang lebih besar pada perekonomian. Oleh karena itu, sangat penting bagi UMKM untuk terus berinvestasi dalam inovasi dan teknologi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan.

Menganalisis pengembangan UMKM terdapat beberapa kerangka teoritis, diantaranya :

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi menguraikan bagaimana berbagai faktor dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian. Dalam konteks UMKM, teori ini menekankan pentingnya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur sebagai pendorong utama pertumbuhan. UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan inovasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing (Solow, 1956). Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM dengan fokus pada investasi di bidang sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur harus menjadi prioritas utama. Langkah

ini tidak hanya akan memperkuat posisi UMKM dalam perekonomian, tetapi juga mendukung stabilitas dan perkembangan ekonomi secara keseluruhan.

2. Teori Manajemen

Teori manajemen, termasuk pendekatan manajemen strategis, dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana UMKM mengelola sumber daya mereka secara efektif. Konsep seperti perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan manajemen risiko sangat relevan untuk membantu UMKM dalam merumuskan strategi pengembangan yang berkelanjutan. Model manajemen juga mencakup aspek seperti kepemimpinan dan budaya organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM (*Mintzberg, 2009*). Maka dengan itu, untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, UMKM perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen yang baik dalam operasional mereka. Dengan demikian, pengelolaan yang efektif tidak hanya akan meningkatkan daya saing UMKM, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam ekosistem ekonomi yang lebih luas.

3. Teori Jaringan (*Network Theory*)

Teori jaringan menjelaskan bagaimana hubungan antar individu atau organisasi dapat mempengaruhi kinerja dan pengembangan UMKM. Dalam konteks ini, kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pemasok, pelanggan, dan lembaga pemerintah, dapat membantu UMKM dalam mengakses sumber daya, informasi, dan pasar yang lebih luas. Jaringan yang kuat dapat meningkatkan daya saing dan kemampuan inovasi UMKM (*Granovetter, 1973*). Jaringan sosial dan profesional yang solid tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya strategis, tetapi juga sebagai platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, yang sangat penting dalam menghadapi

tantangan di pasar yang kompetitif. Dengan demikian, pengembangan jaringan yang efektif harus menjadi fokus utama bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian negara, khususnya dalam menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2020), UMKM menyumbang sekitar 60% terhadap PDB total dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Dalam hal ini, teori pembangunan ekonomi mengungkapkan bahwa pengembangan UMKM dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Sukirno, 2015). Selain itu, teori ekonomi mikro juga relevan, di mana UMKM beroperasi sebagai unit ekonomi yang berinteraksi dalam pasar lokal dan global (Mankiw, 2014).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan UMKM di Indonesia meliputi akses terhadap pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, infrastruktur, serta regulasi dan kebijakan pemerintah. Akses terhadap pembiayaan menjadi salah satu tantangan utama bagi UMKM, di mana banyak pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Pendidikan dan pelatihan juga berperan penting dalam meningkatkan keterampilan manajerial dan teknis pelaku UMKM, yang dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar. Selain itu, infrastruktur yang memadai, seperti transportasi dan teknologi informasi, sangat diperlukan untuk mendukung operasional UMKM. Regulasi yang mendukung, seperti

kemudahan perizinan dan insentif pajak, juga dapat mendorong pertumbuhan sektor ini (Sari & Rahardjo, 2019).

Strategi pengembangan UMKM yang efektif mencakup peningkatan kapasitas manajerial melalui program pelatihan, dorongan untuk inovasi produk dan proses, serta strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan akses pasar. Kemitraan dengan sektor swasta juga bisa menjadi strategi yang efisien dalam memperluas akses ke pasar. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, pengembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Prasetyo, 2020).

G. Metode Penelitian

a) Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan sekaligus menganalisis bagaimana penerapan *Collaborative Governance* berperan dalam pengembangan UMKM di wilayah Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Sleman. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami secara mendalam proses, hubungan, serta dinamika antara berbagai aktor dalam kerangka *Collaborative Governance*. Penelitian deskriptif kualitatif memberikan kesempatan bagi peneliti untuk secara mendalam memahami dinamika serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan program-program pemerintah di tingkat kalurahan (Saadah, M 2022)

b) Unit analisis

Analisis dalam penelitian dilakukan pada unit tertentu dengan mencakup berbagai aktor yang terlibat dalam *Collaborative Governance* guna

mendukung pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo. Beragam pihak ini termasuk pemerintah lokal, seperti perangkat desa dan kecamatan, yang bertindak sebagai fasilitator, para pelaku UMKM sebagai pelaksana kegiatan ekonomi, masyarakat setempat yang berperan sebagai penerima manfaat, serta pihak swasta yang dapat memberikan dukungan dalam bentuk modal atau jaringan pasar. Selain itu, lembaga pendukung lainnya, seperti organisasi non-pemerintah dan lembaga pelatihan, juga berperan dalam proses kolaboratif ini untuk memperkuat UMKM dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

- Subjek penelitian :

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang menjadi sumber data dalam penelitian ini.

| | |
|---------------------|---------|
| Lurah | 1 orang |
| Perangkat Kalurahan | 2 orang |
| Sekretaris BPKal | 2 orang |
| Pelaku UMKM | 5 orang |
| Tokoh Masyarakat | 5 orang |

Adapun teknik dalam menentukan narasumber yaitu *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memilih individu atau kelompok yang memiliki karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang mendalam, di mana penelitian secara selektif memilih narasumber berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. *Purposive sampling* memungkinkan peneliti untuk memilih kasus yang paling

informatif, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai fenomena yang diteliti (Patton, 2002).

- Obyek penelitian :

Objek penelitian mengacu pada fenomena atau topik utama yang menjadi fokus penelitian, yaitu penerapan *Collaborative Governance* dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman.

c) Teknik pengumpulan data

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, sehingga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut John W. Creswell (2014), terdapat berbagai metode dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif, seperti wawancara, observasi, dan analisis data. Berikut ini adalah penjelasan tentang teknik-teknik pengumpulan data tersebut:

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015), wawancara didefinisikan sebagai sebuah pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi atau ide melalui proses tanya jawab. Wawancara juga dapat dipandang sebagai teknik pengumpulan data yang melibatkan komunikasi antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak berperan sebagai pewawancara atau penanya, sementara pihak lainnya sebagai informan atau narasumber. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai situasi dan kondisi yang terjadi.

Wawancara adalah metode pengumpulan atau pencarian data melalui tanya jawab langsung (tatap muka) dengan pihak-pihak yang dianggap relevan atau diperlukan. Dalam proses ini, interaksi dan komunikasi memegang peranan penting, karena peneliti mengumpulkan informasi dengan menemui informan secara langsung untuk memperoleh keterangan terkait hal-hal yang diketahui mereka, seperti peristiwa, fakta, atau pendapat. Peneliti juga menggunakan panduan wawancara yang disusun berdasarkan cakupan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak-pihak yang terlibat.

Wawancara akan digunakan untuk menggali pandangan individu dari berbagai pihak yang terlibat dalam *collaborative governance*, seperti perangkat Desa, pelaku UMKM, lembaga pemerintah, dan mitra pengembangan UMKM. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai proses kolaborasi, hambatan yang dihadapi, serta manfaat yang diperoleh dari kolaborasi tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2013), wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang kaya dan terperinci dari narasumber, yang sulit didapatkan melalui metode lain. Peneliti akan melakukan wawancara dengan perangkat desa terkait kebijakan yang diterapkan untuk mendukung UMKM, serta dengan pelaku UMKM untuk mengetahui dampak konkret dari program kolaboratif yang ada.

2. Observasi

Menurut Suharsani Arikunto (2010), observasi merupakan pengamatan langsung terhadap suatu objek di lingkungan yang sedang berlangsung dengan mencakup penggunaan berbagai teknik pengindraan untuk memfokuskan perhatian pada objek tersebut. Sedangkan menurut Nana Sudjana (2008), mendefinisikan observasi sebagai suatu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap berbagai gejala yang diteliti. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap gejala atau kejadian-kejadian yang terjadi dilapangan.

Observasi digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana proses kolaborasi antara aktor-aktor tersebut berlangsung dalam praktik. Peneliti terlibat dalam kegiatan atau forum (FORKOM) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pertemuan antara pemerintah desa dan pelaku UMKM, pelatihan yang diberikan kepada pelaku UMKM, serta kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan UMKM. Peneliti juga mengamati secara langsung interaksi antara pelaku UMKM dengan pasar potensial untuk memahami bagaimana pemasaran produk UMKM. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara kerja kolaborasi tersebut, baik secara formal maupun informal, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi pengembangan UMKM.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018), dokumentasi merupakan suatu metode/teknik pengumpulan data serta informasi dalam bentuk baik itu berupa

buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan melalui dokumentasi dilakukan dengan menganalisis serta menyelidiki buku, dokumen, catatan harian dan sebagainya digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan kebijakan, laporan kegiatan, serta data tentang UMKM di Kalurahan Umbulharjo. Dokumentasi berupa laporan tahunan serta arsip-arsip lain yang relevan akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang upaya yang telah dilakukan dalam pengembangan UMKM.

d) Teknik analisis data

Menurut Sugiono (2007), analisis data kualitatif merupakan proses pencarian dan pengorganisasian data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori-kategori tertentu, menjabarkan data ke dalam unit-unit kecil, menyintesis informasi, menyusun pola, memilih data yang relevan dan penting untuk dipelajari, serta menarik kesimpulan agar mudah dipahami oleh individu maupun orang lain. Sementara itu, menurut Miles dan Huberman (2014), teknik analisis data terdiri dari beberapa langkah atau komponen, yang dimulai dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan informasi yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan mengambil langkah-langkah tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya

mengumpulkan data yang relevan dari para informan untuk dijadikan dasar dalam mengkaji *Collaborative Governance* dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang bertujuan untuk menyaring, mengklasifikasikan, mengarahkan, serta mengeliminasi data yang tidak relevan, sambil mengorganisasi data dengan cara yang memudahkan penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses ini juga dapat dipahami sebagai pemilihan, seleksi, pemusatan, atau penyederhanaan informasi yang relevan untuk mendukung data penelitian di lapangan (Zulfirman, 2022). Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan dengan ketat agar dapat menghasilkan kesimpulan yang jelas.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengorganisir informasi untuk menghasilkan kesimpulan dan mengambil keputusan. Data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, atau format lainnya. Tujuan utama dari penyajian data ini adalah untuk mempermudah peneliti dalam memahami permasalahan yang ada dan merencanakan langkah selanjutnya dalam pengembangan UMKM melalui kerjasama antara pemerintah dan pemangku kepentingan di Kalurahan Umbulharjo.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Kesimpulan tersebut diperoleh dari data yang telah dianalisis dan divalidasi berdasarkan bukti yang ditemukan di lapangan. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan mengenai penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Sleman, DIY.

BAB II

PROFIL KALURAHAN UMBULHARJO, KAPANEWON CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN

A. Sejarah Kalurahan Umbulharjo

Kalurahan Umbulharjo sebelumnya dikenal dengan nama Pentingsari. Namun kemudian, nama “Umbulharjo” berasal dari keberadaan sebuah umbul atau mata air besar yang menjadi sumber kehidupan utama bagi penduduk setempat maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Nama Umbulharjo tersebut diberikan untuk menggambarkan harapan dan potensi di wilayah sebagai pusat kemakmuran dan kesejahteraan. Secara etimologis, "Umbul" berarti mata air, sedangkan "Harjo" (Raharjo) berarti makmur dan tenteram. Dengan demikian, pemberian nama Umbulharjo mencerminkan aspirasi agar Daerah ini menjadi tempat yang mendukung kesejahteraan, ketenteraman, dan keberlanjutan hidup bagi seluruh masyarakatnya. Kehadiran mata air tersebut tidak hanya memberikan manfaat secara ekologis, tetapi juga membentuk identitas dan semangat kolektif bagi penduduknya.

Kalurahan Umbulharjo, yang terletak di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, resmi dibentuk berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur melalui Maklumat Nomor 5 Tahun 1948. Maklumat ini merupakan tindak lanjut dari pengumuman sebelumnya pada tahun 1946 yang bertujuan untuk mengatur perubahan wilayah administratif Kelurahan di wilayah Yogyakarta. Proses pembentukan ini mencerminkan upaya pemerintah Daerah pada masa itu untuk menata ulang struktur administrasi guna meningkatkan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal.

Hingga saat ini, Kalurahan Umbulharjo telah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang mencerminkan dinamika politik dan administratif di tingkat lokal. Pergantian lurah ini menjadi cerminan bagaimana masyarakat setempat menjalani proses demokrasi, adaptasi terhadap perubahan, dan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan warga dan perkembangan zaman.

Pemerintah Kalurahan Umbulharjo, sebagai institusi berfungsi sebagai pengelola dan penyelenggara kehidupan masyarakat melalui berbagai program, nilai, alat, dan organisasi yang terstruktur. Program-program pemerintah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Nilai-nilai yang diusung oleh pemerintah, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Alat-alat yang digunakan, seperti regulasi, anggaran, dan teknologi, berperan penting dalam mendukung efektivitas program-program tersebut. Selain itu, organisasi pemerintah yang terdiri dari berbagai lembaga dan instansi, baik di tingkat pusat maupun Daerah, berfungsi untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara efisien, sehingga dapat menciptakan tata kelola yang baik dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

B. Kondisi Geografis

Kalurahan Umbulharjo terletak di Kapanewon Cangkringan, berjarak sekitar 17,4 km ke arah timur laut dari pusat pemerintahan Kabupaten Sleman. Lokasinya yang strategis didukung oleh aksesibilitas yang baik, dengan jaringan jalan kabupaten yang menghubungkannya dengan wilayah-wilayah sekitar. Secara geografis, Kalurahan Umbulharjo berada pada koordinat $07^{\circ}34'16''\text{LS}$ - $07^{\circ}39'07''\text{LS}$ dan $110^{\circ}25'36''\text{BT}$ - $110^{\circ}26'52''\text{BT}$.

Wilayah ini memiliki topografi pegunungan dengan ketinggian antara 475 hingga 1.300 meter di atas permukaan laut. Curah hujan rata-rata di wilayah ini berkisar antara 600-900 mm perbulan, dengan suhu rata-rata harian antara $18-30^{\circ}\text{C}$. Sungai Kuning mengalir di bagian barat dan Sungai Sriwil di bagian timur wilayah ini. Keberadaan kedua sungai tersebut, dengan aliran airnya yang konstan sepanjang tahun, berperan penting dalam menjaga stabilitas permukaan air tanah. Kombinasi kondisi geografis dan topografi ini menjadikan Kalurahan Umbulharjo sebagai wilayah yang potensial untuk pengembangan sumber daya alam dan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

Secara administrasi Kalurahan Umbulharjo terletak di Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman dengan batas sebelah utara yaitu Taman Nasional Gunung Merapi, batas sebelah selatan yaitu Kalurahan Wukirsari Cangkringan, batas sebelah barat yaitu Kalurahan Hargobinangun Pakem dan sebelah timur Kalurahan Kepuharjo, Cangkringan. Berikut batas Wilayah Kalurahan Umbulharjo Kapanewon cangkringan:

Tabel 2.1 Batas Wilayah Kalurahan Umbulharjo

| | | | |
|----|---------|---|--|
| 1. | Utara | : | Taman Nasional Gunung Merapi/Kapanewon Selo Kabupaten Boyolali |
| 2. | Selatan | : | Kalurahan Wukisari Cangkringan |
| 3. | Barat | : | Kalurahan Hargobinangun Kapanewon Pakem |
| 4. | Timur | : | Kalurahan Kepuhharjo |

(Sumber: Data Kalurahan Umbulharjo Tahun 2021)

Berdasarkan data pada tabel di atas, kita dapat mengetahui bahwa perbatasan Wilayah Kalurahan Umbulharjo, Cangkringan adalah sebelah utara perbatasan dengan taman nasioanal Gunung Merapi/Kapanewon Selo, Kabupaten Boyolali, di sebelah selatan perbatasan dengan Kalurahan Wukisari, Cangkringan, di sebelah barat perbatasan dengan Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem dan di sebelah timur perbatasan dengan Kalurahan kepuharjo. Berikut batasan Obintasi Kalurahan Umbulharjo, Cangkringan:

Tabel 2.2 Batasan Obintasi Kalurahan Umbulharjo

| | | | |
|----|---|---|--------|
| 1. | Jarak dari pusat pemerintahan Kapanewon | : | 8 km |
| 2. | Jarak dari ibu kota Kabupaten | : | 21 km |
| 3. | Jarak dari ibu kota Propinsi | : | 29 km |
| 4. | Jarak dari ibu kota Negara | : | 530 km |

(Sumber: Data Kalurahan Umbulharjo Tahun 2021)

Data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Kalurahan Umbulharjo, yang terletak di Kapanewon Cangkringan memiliki jarak geografis yang strategis, yaitu 8 km dari pusat pemerintahan Kapanewon, 21 km dari Ibu kota Kabupaten, 29 km dari Ibu kota Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY), dan 530 km dari Ibu kota Negara Indonesia.

Padukuhan Kalurahan Umbulharjo terbagi menjadi 9 padukuhan, 40 RT, 20 RW yaitu:

Tabel 2.3 Data Padukuhan Wilayah Kalurahan Umbulharjo

| No | Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah RW |
|----|--------------|-----------|-----------|
| 1. | Pelemsari | 4 | 2 |
| 2. | Pangukrejo | 6 | 3 |
| 3. | Gondang | 4 | 2 |
| 4. | Gambretan | 6 | 3 |
| 5. | Balong | 4 | 2 |
| 6. | Plosorejo | 4 | 2 |
| 7. | Karanggeneng | 4 | 2 |
| 8. | Plosokerep | 4 | 2 |
| 9. | Pentingsari | 4 | 2 |

(Sumber: Data Kalurahan Umbulharjo Tahun 2021)

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat menyajikan informasi mengenai jumlah RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) di sembilan padukuhan yang ada di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan. Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar padukuhan memiliki jumlah RT dan RW yang sama, yakni 4 RT dan 2 RW, kecuali Pangukrejo dan Gambretan yang memiliki jumlah RT dan RW lebih banyak, masing-masing 6 RT dan 3 RW.

C. Kondisi Demografis

1. Jumlah Penduduk

Data penduduk Kalurahan Umbulharjo tahun 2021, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi per akhir bulan Desember 2021, 5086 jiwa dan jumlah kepala keluarga di Kalurahan Umbulharjo adalah 1863 KK, dan jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 2.463 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 2.623 jiwa. Selain itu, terdapat 1.617 kepala keluarga laki-laki dan 246 kepala keluarga perempuan. Adapun data penduduk selengkapnya pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah dan Gender

| No | Padukuhan | Jumlah KK | | Jumlah | Jumlah Jiwa | | Jumlah |
|--------|--------------|-----------|------|--------|-------------|------|--------|
| | | P | L | | L | P | |
| 1. | Pelemsari | 25 | 72 | 97 | 105 | 128 | 233 |
| 2. | Pangukrejo | 34 | 249 | 283 | 247 | 416 | 663 |
| 3. | Gondang | 45 | 215 | 260 | 373 | 387 | 760 |
| 4. | Gambretan | 29 | 202 | 231 | 337 | 329 | 666 |
| 5. | Balong | 29 | 208 | 237 | 319 | 349 | 668 |
| 6. | Plosorejo | 21 | 147 | 168 | 261 | 249 | 510 |
| 7. | Karanggeneng | 27 | 198 | 225 | 316 | 300 | 616 |
| 8. | Plosokerep | 21 | 191 | 211 | 297 | 272 | 569 |
| 9. | Petingsari | 16 | 135 | 151 | 208 | 193 | 401 |
| Jumlah | | 246 | 1617 | 1863 | 2463 | 2623 | 5086 |

(Sumber: Data Kalurahan Umbulharjo, berdasarkan sistem informasi Kab. Sleman Desember 2021)

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di wilayah Kalurahan Umbulharjo terdiri dari 1.863 kepala keluarga (KK) dengan total jumlah jiwa mencapai 5.086 orang. Dari total tersebut, terdapat 2.463 laki-laki dan 2.623 perempuan, yang menunjukkan bahwa proporsi gender di wilayah ini cenderung lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Dari sembilan padukuhan yang tercatat, Pangukrejo memiliki jumlah penduduk tertinggi dengan 663 jiwa, diikuti oleh Gondang dengan 760 jiwa. Sementara itu, padukuhan dengan jumlah penduduk terendah adalah Petingsari, yang hanya memiliki 401 jiwa. Dalam hal distribusi gender, padukuhan Pangukrejo juga mencatatkan jumlah laki-laki dan perempuan yang signifikan, yaitu 247 laki-laki dan 416 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa padukuhan ini tidak hanya memiliki jumlah penduduk yang tinggi, tetapi juga ketidakseimbangan gender yang lebih mencolok. Sebaliknya, padukuhan Pelemsari memiliki jumlah penduduk yang lebih seimbang dengan 105 laki-laki dan 128 perempuan. Kegiatan sehari-hari masyarakat di wilayah ini dapat dipengaruhi oleh komposisi penduduk yang beragam. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 5.086 jiwa, masyarakat terlibat dalam berbagai aktivitas, seperti pertanian, perdagangan, dan pendidikan, yang mencerminkan kebutuhan dan potensi lokal. Kehidupan sehari-hari di padukuhan dengan jumlah penduduk tinggi, seperti Pangukrejo dan Gondang lebih dinamis, dengan banyaknya interaksi sosial dan kegiatan ekonomi. Sementara itu, padukuhan dengan jumlah penduduk lebih sedikit, seperti Petingsari memiliki kegiatan yang lebih sederhana dan terfokus pada komunitas.

2. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

Berikut ini adalah data penduduk kalurahan Umbulharjo berdasarkan tingkat usia:

Tabel 2.5 Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

| No. | Kalurahan | Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia | | | | | | | | | Jumlah |
|-----|------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| | | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-50 | 51-60 | 61-70 | 71-74 | 75-+ | |
| 1. | Umbulharjo | 793 | 862 | 815 | 747 | 889 | 612 | 414 | 119 | 149 | 5086 |

(Sumber: Data Kalurahan Umbulharjo, Berdasarkan Sistem Informasi Kependudukan Kab.Sleman Desember 2021)

Berdasarkan data pada tabel di atas, telah menunjukkan jumlah penduduk di Kalurahan Umbulharjo berdasarkan kelompok usia. Data ini dapat disimpulkan bahwa kelompok usia 40-50 tahun memiliki jumlah penduduk terbesar (889 jiwa), sementara kelompok usia 71-74 tahun memiliki jumlah penduduk terkecil (119 jiwa). Terdapat distribusi penduduk yang cukup merata di berbagai kelompok usia, meskipun jumlah penduduk di usia muda (0-29 tahun) dan usia produktif (30-50 tahun) lebih tinggi.

3. Data Penduduk Berdasarkan Agama

Berikut adalah data penduduk Kalurahan Umbulharjo berdasarkan agama:

Tabel 2.6 Data Penduduk Berdasarkan Agama

| No. | Agama/Kepercayaan | Jumlah Jiwa |
|--------|-------------------|-------------|
| 1. | Islam | 4962 |
| 2. | Katholik | 82 |
| 3. | Kristen | 42 |
| Jumlah | | 5086 |

(Sumber : Profil Kalurahan Umbulharjo Tahun 2021)

Dari data tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas agama penduduk di Kalurahan Umbulharjo adalah beragama Islam dengan jumlah 4962 jiwa, kemudian disusul oleh penduduk yang beragama Katholik dengan jumlah 82 jiwa, dan yang terakhir adalah penduduk beragama Kristen dengan jumlah 42 jiwa. Dapat disimpulkan bahwa di Kalurahan Umbulharjo hanya terdapat 3 agama yaitu Islam, Katholik, dan Kristen. Sedangkan untuk agama Hindu, Budha, Konghucu, dan Aliran Kepercayaan Lainnya tidak ada pemeluknya. Dengan adanya perbedaan keyakinan, penduduk di Kalurahan Umbulharjo memiliki rasa tolerasansi dan kebersamaan yang sangat erat antara satu sama lain.

4. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Berikut adalah data penduduk Kalurahan Umbulharjo berdasarkan pekerjaan:

Tabel 2.7 Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

| No. | Pekerjaan | Jumlah Jiwa |
|-------|-----------------------|-------------|
| 1 | Belum Bekerja | 919 |
| 2 | Mengurus Rumah Tangga | 769 |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 991 |
| 4 | Pensiunan | 46 |
| 5 | PNS | 54 |
| 6 | TNI | 5 |
| 7 | POLRI | 7 |
| 8 | Perdagangan | 9 |
| 9 | Petani/Pekebun | 979 |
| 10 | Peternak | 9 |
| 11 | Karyawan Swasta | 654 |
| 12 | Karyawan BUMN | 5 |
| 13 | Karyawan BUMD | 6 |
| 14 | Karyawan Honorer | 15 |
| 15 | Buruh Harian Lepas | 298 |
| 16 | Buruh Tani/Perkebunan | 127 |
| 17 | Tukang Batu | 5 |
| 18 | Tukang Kayu | 4 |
| 19 | Tukang Jahit | 3 |
| 20 | Mekanik | 5 |
| 21 | Dosen | 6 |
| 22 | Guru | 21 |
| 23 | Perawat | 6 |
| 24 | Sopir | 77 |
| 25 | Pedagang | 51 |
| 26 | Perangkat Desa | 18 |
| 27 | Kepala Desa | 1 |
| 28 | Biarawan/Biarawati | 4 |
| 29 | Wiraswasta | 292 |
| Total | | 5086 |

(Sumber : Profil Kalurahan Umbulharjo Tahun 2021)

Berdasarkan data tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas pekerjaan masyarakat di Kalurahan Umbulharjo adalah sebagai Pelajar/Mahasiswa dengan jumlah sebanyak 991 jiwa, kemudian disusul oleh masyarakat yang bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan jumlah sebanyak 979 jiwa, kemudian peringkat ketiga ditempati oleh masyarakat yang belum bekerja.

2. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut adalah data penduduk Kalurahan Umbulharjo berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 2.8 Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Kelompok Pendidikan | Jumlah Jiwa |
|-------|---------------------|-------------|
| 1. | Tidak/Belum Sekolah | 945 |
| 2. | SD | 1798 |
| 3. | SLTP | 1003 |
| 4. | SLTA | 1352 |
| 5. | D1 | 20 |
| 6. | D2 | 16 |
| 7. | D3 | 75 |
| 8. | S1 | 173 |
| 9. | S2 | 17 |
| Total | | 5086 |

(Sumber : Profil Kalurahan Umbulharjo Tahun 2021)

Berdasarkan data tabel diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat di Kalurahan Umbulharjo dengan jenjang pendidikan Tidak/Belum Sekolah berjumlah 945 jiwa, SD berjumlah 1798 jiwa, SLTP berjumlah 1003 jiwa, SLTA berjumlah 1352 jiwa, D1

berjumlah 20 jiwa, D2 berjumlah 16 jiwa, D3 berjumlah 75 jiwa, S1 berjumlah 173 jiwa, dan S2 berjumlah 17 jiwa.

D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman memiliki berbagai kegiatan dan inisiatif pemerintahan Kalurahan dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di seluruh wilayah Kalurahan Umbulharjo. Salah satu upaya Pemerintahan Kalurahan Umbulharjo tersebut, adalah melalui Forum Komunukasi (FORKOM) UMKM Kalurahan Umbulharjo, yang aktif memfasilitasi pendaftaran produk UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.

Selain itu, FORKOM UMKM Kalurahan Umbulharjo pada tahun 2024 lalu berhasil meraih juara 1 pada penghargaan Nata Sembada, sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada inisiatif terbaik dalam pengelolaan dan pemberdayaan UMKM tesebut. Prestasi ini tidak hanya menunjukkan komitmen Forkom UMKM di Kalurahan Umbulharjo dalam mendukung pertumbuhan usaha lokal, tetapi juga menjadi bukti nyata dari kerja keras dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah Kalurahan, pelaku usaha, dan masyarakat. Informasi mengenai penghargaan ini juga telah dipublikasikan melalui akun Instagram resmi mereka yaitu Kalurahan Umbulharjo. Hal tersebu, menjadi semangat serta inspirasi bagi pelaku UMKM lainnya yang ada di Kalurahan Umbulharjo untuk terus berkembang dan berinovasi.

Salah satu contoh UMKM yang berkembang di Kalurahan Umbulharjo pada saat ini adalah UMKM Naura Jamur, yang berlokasi di Dusun Gambretan. UMKM ini

secara khusus bergerak dalam bidang budidaya dan pengolahan jamur, memproduksi berbagai olahan berbasis jamur dengan kualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional. Dalam menjalankan kegiatannya, UMKM Naura Jamur mendapatkan pendampingan intensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan lembaga pendukung, untuk meningkatkan keterampilan teknis, manajemen usaha, serta inovasi produk. Pendampingan tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat motivasi pelaku usaha, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas produksi, efisiensi operasional, dan perluasan jaringan pemasaran, sehingga UMKM ini mampu berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian lokal, terutama di Wilayah Kalurahan Umbulharjo.

Selain itu, pada 6 Januari 2025, akun Instagram @carya. UMKM membagikan laporan kunjungan ke sentra kerajinan batu yang terletak di Kalurahan Umbulharjo. Sentra ini menampilkan beragam produk kerajinan yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM setempat, mulai dari aksesoris rumah tangga hingga karya seni bernilai tinggi yang memadukan estetika tradisional dan modern. Kunjungan ini menjadi bukti nyata bahwa UMKM di Kalurahan Umbulharjo memiliki potensi besar dalam menghasilkan produk kreatif yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan identitas budaya lokal.

Dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Umbulharjo, Kabupaten Sleman, peran Pemerintah Kalurahan dan berbagai stakeholder sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Pemerintah Kalurahan bersama dengan berbagai institusi publik dan swasta serta komunitas lokal terlibat dalam berbagai program pengembangan UMKM, mulai dari penyusunan regulasi yang mendukung, program pelatihan dan bimbingan bagi pelaku UMKM, hingga kolaborasi dalam

mempromosikan produk lokal ke pasar yang lebih luas. Melalui Forum Komunikasi UMKM (FORKOM) yang berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten, kerjasama dalam berbagai kegiatan pengembangan UMKM semakin terjalin erat. Adanya komitmen bersama antara Pemerintah Kalurahan dan stakeholder lainnya untuk mendorong UMKM agar lebih proaktif dalam mencari pangsa pasar yang lebih luas serta terlibat dalam kegiatan pengembangan produk baru.

Dengan berbagai inisiatif, kolaborasi, dan prestasi yang telah diraih, Kalurahan Umbulharjo terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan UMKM sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Berikut ini adalah tabel daftar nama dan alamat UMKM Kalurahan Umbulharjo:

Tabel 2.9 Daftar Nama Dan Alamat UMKM Kalurahan Umbulharjo

| No. | Nama UMKM dan Alamat | No. | Nama UMKM dan Alamat |
|-----|--|-----|--|
| 1. | Naura Jamur Gambretan Mbak Yuli , 082137243573 | 13. | Batik Badong Mas Yoga / Mbak Fitri, 081144408688 Pentingsari. |
| 2. | Tunggak Semi Budidaya dan Produksi Kopi Pentingsari 081578499044 | 14. | Tape Ketan dan Jahe instan Gondang Mbak Dwi, 085725900080 |
| 3. | Wedang Rempah Pentingsari Mbak Marsinah, 085786412164 | 15. | Arafa Clean Aneka Sabun Plosorejo Mbak Iswatun, 085888965152 |
| 4. | Telur asin “SR” Produksi telur asin Tangkisan Mbak Sartinem, 085870074690 | 16. | Pempek Yami Produksi pempek Gambretan Mbak Novi, 081319233778 |
| 5. | Telur asin “ST” Produksi telur asin Tangkisan Mbak Siti, 08156572346 | 17. | Batu Barokah Kerajinan batu (Cobek) Polorejo Mas Surandi, 081578469802 |
| 6. | Balelawang species orchid Budidaya anggrek species Karanggeneng Mas Anton, 087731728778 | 18. | Naladipa orchid Anggrek species Karanggeneng Mas Tejo, 082134535520 |
| 7. | Desthi Orchid Anggrek species Karanggeneng Mas Amin, 082195512383 | 19. | Aneka Criping dan Jamu Produksi criping dan jamu Karanggeneng Mbak Sutarti, 085877436141 |
| 8. | Kopi Pak Kasno Budidaya dan produksi kopi Ngrangkah Pangukrejo Mas Kasno, 082324487994 | 20. | Aneka criping dan Kerajinan rajut Produksi criping dan kerajinan rajut Bendosari 081353243547 |
| 9. | Aneka keripik dan ceriping Produksi keripik dan ceriping Pentingsari Mbak Lis Titik, 085848630601 | 21. | Susu sapi Pasteurisasi Cap Merapi Produksi minuman susu sapi murni Plosorejo Mbak Sukiyem, 085174403539 |
| 10. | Aneka Snack Produksi aneka snack (Risol, martabak, ceriping, dll) Karanggeneng Mbak Suyati, 085729294303 | 22. | Kripik usus Rachma Produksi kripik usus Pentingsari Mbak Rachma, 085211565481 |
| 11. | Kelik Cobek Kerajinan batu Sambisari Mas Kelik, 081331198505 | 23. | Aneka Keripik dan Criping Bu Hartini Produksi keripik dan ceriping Balong wetan Mbak Hartini, 081392067217 |
| 12. | Gin Gin Snack Produksi aneka kripik dan ceriping Pentingsari 085641486642 | 24. | Cobek Pak Wignyo Kerajinan batu Plosorejo Mas Wiknyo, 085842371489 |

(Sumber : Kalurahan Umbulharjo 2024)

Berdasarkan data tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa daftar UMKM yang terdapat di Kalurahan Umbulharjo tahun 2024, pada tabel nomor 1-6 diversifikasi Produk Pangan dan Budidaya. Naura Jamur (Gambreta) Fokus pada budidaya dan pengolahan jamur berkualitas tinggi, produk-produk tersebut menawarkan solusi pangan sehat dan bernilai. Tunggak Semi (Pentingsari) Usaha ini bergerak dalam budidaya dan produksi kopi dengan proses yang terstandar, Produk kopi ini

mencerminkan cita rasa khas lokal. Wedang Rempah (Pentingsari) Menghasilkan minuman tradisional berbahan rempah alami, Wedang ini menawarkan manfaat kesehatan sekaligus menjaga tradisi. Telor Asin “SR” (Tangkisan) Memproduksi telur asin dengan rasa khas, Produk ini menjadi favorit di kalangan masyarakat lokal dan luar daerah. Telor Asin “ST” (Tangkisan): Alternatif lain dari telur asin, yang menawarkan kualitas dan cita rasa berbeda. Balelawang *Species Orchid* (Karanggeneng) Spesialis dalam budidaya anggrek species dengan keindahan alami.

Pada tabel nomor 7-12 pengolahan Makanan dan Produk Kreatif. Desthi Orchid (Karanggeneng) fokus pada pembudidayaan anggrek yang langka dan eksotis. Kopi Pak Kasno (Ngrangkah Pangukrejo) produksi kopi khas yang diproses dengan teknik tradisional, dipasarkan oleh Mas Kasno. Aneka Keripik dan Ceriping (Pentingsari) beragam keripik dan ceriping dengan rasa yang menggugah selera. Aneka Snack (Karanggeneng) memproduksi risol, martabak, dan ceriping berkualitas. Kelik Cobek (Sambisari) kerajinan batu berupa cobek tradisional, dibuat oleh Mas Kelik yang mempertahankan nilai budaya lokal. Gin Gin Snack (Pentingsari) menawarkan berbagai keripik dan ceriping renyah.

Pada tabel nomor 13-18 kerajinan dan Tradisi Lokal. Batik Badong (Pentingsari) menyediakan kain batik, produk jadi, serta workshop batik untuk pelestarian budaya, dikelola oleh Mas Yoga/Mbak Fitri. Tape Ketan dan Jahe Instan (Gondang) Produk tradisional dengan sentuhan modern, dikelola oleh Mbak Dwi. Arafa Clean (Plosorejo) produksi aneka sabun ramah lingkungan, dikelola oleh Mbak Iswatun. Pempek Yami (Gambretan) sajian khas Palembang berupa pempek, diproduksi oleh Mbak Novi. Batu Barokah (Polorejo) menghasilkan cobek batu tradisional, dikelola oleh Mas Surandi. Naladipa Orchid (Karanggeneng) budidaya anggrek species berkualitas tinggi, dipasarkan oleh Mas Tejo.

Pada tabel nomor 19-24 kuliner dan Produk Kreatif. Aneka Criping dan Jamu (Karanggeneng) produksi makanan ringan tradisional dan jamu herbal, dikelola oleh Mbak Sutarti. Aneka Criping dan Kerajinan Rajut (Bendosari): produk kreatif berupa makanan ringan dan hasil rajutan. Susu Sapi Pasteurisasi Cap Merapi (Plosorejo) menawarkan susu sapi murni berkualitas, dikelola oleh Mbak Sukiyem. Kripik Usus Rachma (Pentingsari) produk kripik usus renyah dengan cita rasa khas, dipasarkan oleh Mbak Rachma. Aneka Keripik dan Criping Bu Hartini (Balong Wetan) beragam keripik tradisional, dikelola oleh Mbak Hartini. Cobek Pak Wignyo (Plosorejo) pengrajin cobek batu berkualitas, dipasarkan oleh Mas Wignyo. Dari berbagai macam produk diatas Kalurahan Umbulharjo dapat menghadirkan keberagaman produk UMKM yang tidak hanya menjadi kebanggaan lokal tetapi juga menawarkan potensi besar untuk pengembangan ekonomi berbasis masyarakat di wilayah.

UMKM memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian lokal maupun nasional. Menyusul dari deskripsi daftar UMKM yang terdapat di Kalurahan Umbulharjo pada tahun 2024 yang mencakup berbagai sektor seperti diversifikasi produk pangan, pengolahan makanan, kerajinan, dan produk kreatif, dapat disimpulkan bahwa UMKM di wilayah ini memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Aneka produk UMKM yang dihasilkan menunjukkan keberagaman yang menjadi keunggulan tersendiri, serta menawarkan nilai tambah berupa budaya dan tradisi lokal yang dijaga dengan baik.

Dalam sektor diversifikasi produk pangan dan budidaya, contohnya Naura Jamur yang fokus pada budidaya dan pengolahan jamur berkualitas tinggi. Budidaya jamur tidak hanya memberikan kontribusi dalam penyediaan pangan sehat, tetapi juga memberdayakan petani lokal dan menciptakan nilai ekonomi tambahan melalui produk olahan jamur yang bervariasi. Tunggak Semi yang bergerak dalam budidaya

dan produksi kopi dengan proses standar juga memberikan dampak positif dalam mempromosikan kopi lokal yang berkualitas, memperkuat identitas lokal serta menciptakan lapangan kerja baru dalam industri kopi.

Di sektor pengolahan makanan dan produk kreatif, keripik, ceriping, dan aneka snack yang dihasilkan oleh UMKM seperti Aneka Keripik dan Ceriping, serta Gin Gin Snack menunjukkan inovasi dalam pengolahan makanan ringan dengan citarasa yang menggugah selera. Selain itu, produk tradisional seperti tape ketan, pempek, dan jamu herbal yang dihasilkan oleh UMKM juga turut memperkaya ragam kuliner lokal, sehingga menarik minat wisatawan yang mencari pengalaman kuliner yang autentik.

Dalam sektor kerajinan dan tradisi lokal, UMKM seperti Batik Badong dan Batu Barokah menunjukkan komitmen dalam melestarikan budaya lokal melalui produk-produk khas yang dihasilkan. Selain memberikan kontribusi ekonomi, UMKM kerajinan tradisional juga menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya yang turun-temurun.

Mendukung UMKM di Kalurahan Umbulharjo tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomis bagi para pelaku usaha, tetapi juga memperkuat daya saing wilayah tersebut dalam kancah pasar lokal maupun global. Selain itu, dukungan yang mantap dari pemerintah daerah dan dukungan masyarakat dalam bentuk pembelian produk lokal dapat menjadi pendorong utama dalam mengembangkan UMKM menjadi sektor yang semakin maju dan berdaya saing tinggi, serta memperkuat ekonomi lokal secara keseluruhan.

Kalurahan Umbulharjo, yang terletak di Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, adalah salah satu wilayah yang aktif dalam pengembangan UMKM. Wilayah ini terletak di kawasan lereng Gunung Merapi, sehingga banyak UMKM yang

memanfaatkan potensi alam sekitar sebagai basis pengembangan usaha. Lokasinya yang strategis, dekat dengan jalur wisata seperti Lava Tour Merapi dan kawasan desa wisata, memberikan nilai tambah bagi UMKM lokal.

Gambar 2.1 Peta Lokasi UMKM Kalurahan Umbulharjo



(Sumber : Data Kalurahan Umbulharjo 2024)

Berdasarkan data dari gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa peta lokasi UMKM Kalurahan Umbulharjo ini merupakan alat bantu visual yang dirancang untuk menampilkan penyebaran UMKM di seluruh wilayah kalurahan. Peta ini memberikan informasi yang sangat penting bagi pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat umum, dalam mengidentifikasi potensi ekonomi lokal yang ada di Kalurahan Umbulharjo. Peta ini menampilkan berbagai UMKM yang tersebar di sejumlah padukuhan seperti Pelemsari, Pangukrejo, Gondang, Balong, Lodonrejo, Karangondang, dan Plosokerep, dengan setiap lokasi UMKM ditandai secara jelas melalui penomoran.

Selain menampilkan posisi geografis, peta ini juga dilengkapi dengan daftar rinci yang mencakup nama UMKM, jenis usaha atau produk yang ditawarkan, serta informasi kontak yang dapat dihubungi. UMKM yang terdaftar dalam peta ini menunjukkan keberagaman sektor usaha yang ada di Kalurahan Umbulharjo, mulai

dari sektor pertanian seperti budidaya kopi dan jamur, sektor pangan dengan produksi makanan olahan seperti telur asin dan camilan tradisional, hingga sektor kerajinan yang meliputi produk rajutan dan batik.

Peta ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan lokasi, tetapi juga sebagai media promosi yang efektif untuk memperkenalkan UMKM lokal kepada masyarakat luas. Dengan adanya informasi kontak yang tertera, peta ini mempermudah komunikasi dan interaksi antara konsumen dan pelaku usaha, serta membuka peluang kolaborasi dengan pihak eksternal seperti investor atau mitra usaha.

Keberadaan peta ini diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal dengan memperkuat jejaring usaha di Kalurahan Umbulharjo. Selain itu, peta ini juga dapat menjadi alat bagi pemerintah desa dalam merancang kebijakan atau program pendukung yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi UMKM yang ada. Dengan mengetahui lokasi dan jenis usaha UMKM secara detail, pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih tepat sasaran, baik dalam bentuk pelatihan, fasilitasi akses pasar, maupun bantuan permodalan.

Secara keseluruhan, peta lokasi UMKM Kalurahan Umbulharjo ini menjadi bukti nyata dari potensi ekonomi lokal yang perlu terus dikembangkan dan diberdayakan. Dengan memanfaatkan peta ini secara optimal, diharapkan UMKM di Kalurahan Umbulharjo dapat tumbuh lebih kuat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi Daerah.

BAB III

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

A. Inisiasi Pemerintah Kalurahan Umbulharjo Dalam Pengembangan UMKM

Dalam konteks pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), inisiasi institusi merupakan suatu langkah penting yang dilakukan oleh berbagai lembaga, organisasi, pemerintah, dan pihak terkait dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Inisiasi institusi ini melibatkan upaya untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung, kebijakan yang memadai, program-program pelatihan dan pengembangan, serta mekanisme kolaborasi yang memungkinkan UMKM untuk berkembang secara optimal.

Dengan demikian, inisiasi institusi dalam pengembangan UMKM memiliki peran yang strategis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Langkah-langkah inisiasi institusi ini biasanya mencakup pembentukan lembaga atau unit khusus yang bertanggung jawab atas pengembangan UMKM, penyusunan regulasi yang mendukung UMKM, implementasi program-program pelatihan dan pendampingan, serta fasilitasi untuk akses modal dan pasar bagi UMKM.

Di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, kolaborasi antara berbagai institusi lokal dan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam pengembangan UMKM. Melalui pendekatan *collaborative governance*, institusi-institusi terkait bekerja sama dalam merumuskan kebijakan, merencanakan

program-program pengembangan, dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap capaian UMKM di wilayah Kalurahan.

Inisiasi institusi ini tidak hanya melibatkan pemerintah Kalurahan, tetapi juga melibatkan komunitas lokal, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi ini memungkinkan adanya sinergi antara berbagai sumber daya dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk mendukung UMKM dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

Salah satu bentuk inisiasi institusi dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo adalah dengan melakukan pelatihan bagi pelaku UMKM dan inkubator bisnis untuk UMKM lokal. Hal ini menyediakan berbagai pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku UMKM mulai dari pengembangan produk, manajemen bisnis, hingga pemasaran dan branding. Selain itu, juga berperan sebagai wadah untuk berbagai kegiatan kolaboratif antara UMKM, akademisi, dan praktisi bisnis guna meningkatkan daya saing dan inovasi UMKM di tingkat lokal.

Selain itu, inisiasi institusi juga terlihat dalam upaya pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang mendukung UMKM, seperti pengurusan perizinan yang lebih mudah, akses ke pasar yang lebih luas melalui program promosi produk lokal, dan fasilitasi akses pendanaan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan. Kolaborasi antara pihak swasta juga menjadi faktor penting dalam memperkuat ekosistem UMKM di Kalurahan Umbulharjo.

Dengan adanya inisiasi institusi yang kuat dan kolaboratif dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo, diharapkan UMKM lokal dapat semakin berkembang, meningkatkan kualitas produk dan layanan, menciptakan

lapangan kerja, serta berkontribusi positif terhadap perekonomian dan pembangunan wilayah Kalurahan Umbulharjo.

Berkaitan dengan inisiasi institusi dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo tersebut, hal ini kemudian diterangkan lebih lanjut oleh Danang Sulistya Haryana, selaku Lurah Umbulharjo, yakni:

“UMKM Umbulharjo ini memang inisiasinya semuanya dari mereka, dan kita (Pemerintah Kalurahan) di UMKM Umbulharjo program UMKM Umbulharjo terbagi beberapa FORKOM (Forum Komunikasi) kami selalu mensupport semua kegiatan-kegiatan yang bersumber dari UMKM, bagaimana UMKM itu akan berkembang. Kami melakukan komunikasi dengan pihak UMKM itu salah satunya karna kita punya FORKOM, ada kegiatan biasanya pertemuan FORKOM UMKM satu bulan sekali. Pemerintah selalu mensupport mereka, bagaimana UMKM itu menjadi sebuah perekonomian di tingkat Desa. Jadi pemerintah selalu berkomunikasi, serta pelatihannya juga ada, dan rapat juga selalu dilakukan semua yang berkaitan dengan UMKM dan pengembangan UMKM. Bagaimana UMKM ini bisa naik kelas, tidak hanya standar UMKM yang ada, Kita punya objek wisata itu semuanya berkaitan dengan UMKM. Kita sudah punya FORKOM berarti ini UMKM tentang jamur, UMKM tentang batu, tentang susu, budidaya anggrek, kopi itu kita sudah punya semuanya”. (Wawancara pada tanggal 10 Januari 2025).

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa untuk mendorong kemajuan UMKM secara bersama-sama Inisiasi dan program-program yang digagas oleh Pemerintah Kalurahan memberikan landasan yang kuat bagi para pelaku UMKM di wilayah tersebut. Melalui Forum Komunikasi (FORKOM) yang terbentuk, para pelaku UMKM mendapatkan dukungan serta bimbingan untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, tergambar juga keberagaman UMKM yang ada di Kalurahan Umbulharjo, mulai dari usaha jamur, batu, susu, budidaya anggrek, hingga kopi. Semua ini menjadi bukti nyata betapa kaya potensi UMKM di wilayah tersebut. Menurut peneliti, hal ini berarti bahwa FORKOM UMKM menjadi wadah bagi para pengusaha lokal untuk saling berkomunikasi, berbagi pengetahuan, dan bersinergi dalam menghadapi tantangan bersama. Dengan adanya pertemuan rutin setiap bulan, kolaborasi antara pemerintah dan UMKM semakin terjalin erat. Dukungan

dalam bentuk pelatihan, rapat, dan pembinaan terus dilakukan guna memastikan UMKM dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Kemudian, pihak kalurahan juga memiliki kerjasama antara institusi publik pemerintah daerah dan sektor swasta, hal ini disampaikan oleh Danang Sulistya Haryana, selaku Lurah Umbulharjo, bahwa:

“Kerja sama itu sudah pasti ada antara UMKM di Kalurahan. FORKOM UMKM memiliki induk FORKOM di Tingkat kabupaten, kegiatannya adalah dengan Dinas Koperasi UMKM itu semua kegiatan ada disana dan kegiatan-kegiatan apapun itu pasti ada, bahkan sekarang ada kegiatan yang bentuknya lomba UMKM. Kolaborasi antara stakeholder yang ada dengan pemerintahan Kabupaten Sleman, lalu dengan pihak-pihak swasta, pihak-pihak yang terkait dengan UMKM ini, bahkan kemarin sore dari FORKOM UMKM Kabupaten ingin membuat bagaimana UMKM di Umbulharjo itu eksis, jadi kerjasama itu ada dan nanti MOU-nya di bulan depan. Kaitannya dengan mengembangkan UMKM itu biar benar-benar punya dasar kegiatan yang pasti, jadi tidak hanya sekedar UMKM saja. Jadi UMKM tidak hanya sekedar berkembang, tetapi bagaimana kita mengembangkan UMKM itu. Dimulai dari awal dengan bagaimana sistem penjualannya, bagaimana membuat pangsa pasar, itu selalu kita bersinergi dengan stakeholder yang ada, baik dengan teman-teman kawasan wisata, maupun teman-teman pemangku kebijakan yang kaitannya dengan UMKM”. (Wawancara pada tanggal 10 Januari 2025).

Dalam pernyataan yang disampaikan, terjadi kerja sama yang erat antara Para Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan. FORKOM UMKM (Forum Komunikasi UMKM) merupakan wadah yang menjadi koordinasi para pelaku UMKM di tingkat kabupaten. Dalam konteks ini, FORKOM UMKM bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten dalam menjalankan berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan UMKM. Kegiatan yang dilakukan meliputi berbagai aspek seperti pelatihan, pemasaran, hingga acara lomba UMKM yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM di daerah tersebut. Kerjasama UMKM tidak hanya terbatas pada hubungan antar anggota UMKM saja, tetapi juga melibatkan berbagai pihak terkait seperti pemerintah daerah Kabupaten Sleman, swasta, dan stakeholders lain yang terkait dengan UMKM. Kolaborasi

dengan pihak-pihak eksternal ini memperkuat ekosistem UMKM dan memberikan dukungan yang lebih luas dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satu contoh kolaborasi yang disebutkan adalah kerjasama dengan pihak wisata dan pemangku kebijakan. Dengan bersinergi dengan teman-teman di sektor pariwisata, UMKM dapat memperluas peluang pemasaran produknya, terutama dalam menjangkau pasar wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Selain itu, melibatkan pemangku kebijakan seperti FORKOM UMKM Kabupaten membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan UMKM, baik dalam hal regulasi maupun pemberian dukungan lainnya. Pernyataan tersebut juga menyinggung tentang rencana penandatanganan *Memorandum of Understanding (MOU)* sebagai komitmen formal dalam kerjasama antara UMKM di Umbulharjo dengan FORKOM UMKM Kabupaten. MOU tersebut menjadi landasan bagi berbagai kegiatan kerjasama yang akan dilakukan guna mengembangkan UMKM dengan lebih sistematis dan berkesinambungan. Dalam upaya mengembangkan UMKM, penting bagi pelaku usaha untuk memiliki dasar kegiatan yang kuat dan terstruktur dengan baik. Hal ini termasuk dalam peningkatan sistem penjualan, penetrasi pasar, dan strategi pemasaran yang tepat. Dengan kolaborasi bersama stakeholder yang terlibat, UMKM dapat mengoptimalkan potensinya dan terus berkembang secara berkelanjutan. Menurut peneliti, hal ini dapat dikatakan bahwa kolaborasi antara UMKM di Kalurahan dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan stakeholders lainnya, merupakan fondasi penting dalam pengembangan UMKM. Melalui sinergi dan kerjasama yang kokoh, UMKM dapat meningkatkan daya saing, inovasi, dan kontribusi mereka terhadap perekonomian daerah. Keberlanjutan dalam kerjasama dan komitmen bersama akan memperkuat ekosistem UMKM serta mendorong pertumbuhan sektor ini secara menyeluruh.

Berhubungan dengan tantangan yang dihadapi dalam institusi program UMKM di Kalurahan Umbulharjo tersebut, hal ini kemudian diterangkan lebih lanjut oleh Danang Sulistya Haryana, selaku Lurah Umbulharjo , yakni:

“UMKM itu kita punya FORKOM, kami memberikan support UMKM dengan anggaran Desa untuk ketahanan pangan salah satunya, jadi harus sekian persen diberikan kepada UMKM dalam mensupport kegiatan terkait UMKM. Tantangannya adalah mereka masih hidup seperti biasa, jadi hanya menjual seperti biasa- biasa saja dan tidak ada kegiatan-kegiatan. Akan tetapi dimulai dari sekarang, kita ajak mereka berkomunikasi dalam kegiatan-kegiatan UMKM. Tantangannya adalah menumbuhkembangkan UMKM itu, UMKM itu biasanya dia mandiri, mandiri itu tidak harus secara pribadi tapi bagaimana mereka mandiri benar-benar bagaimana dia mencari pangsa pasar, ini yang harus kita kerjakan, karna pangsa pasar itu bisa mencari tapi kan standarnya biasa, akan tetapi kalo kita dengan standar yang berbeda. Sekarang kan UMKM yang bergerak dibidang kopi nah, bagaimana dari hulu sampai hilir kaitannya dengan kopi dan ini kita lakukan. Bagaimana tentang UMKM batu, batu itu dijual harganya ya segitu-segitu saja. Tapi bagaimana batu ini nanti menjadi produk yang bisa dibawa keluar Negeri atau ke ekspor impor mau kita bawa kemana-mana, dan ini kita buat seperti itu. Ini selalu kita komunikasikan tentang mereka bagaimana Masyarakat UMKM terkait dengan susu, susu yang dibuat cuman seperti itu saja, tapi kita akan berupaya bagaimana susu tersebut bisa menjadi susu dengan banyak rasa, banyak varian, supaya akan disukai oleh banyak Masyarakat Nah ini menjadi tantangan kita dalam membuat produk-produk baru yang berkaitan dengan kegiatan UMKM. Itulah tantangan berat kita, dalam membuat pangsa pasar yang belum pasti, karena kita harus mencari yang pasti lalu setiap per tahun disini ada kegiatan, misalnya bazar UMKM. Jadi Masyarakat tau disana produk ini ada disana dan ini sudah mulai menggunakan metode barcode, metode ini dilakukan agar UMKM di Kalurahan Umbulharjo ini benar-bener menjadi sektor buruh perekonomian di kalangan Desa dan ditingkat kalurahan”. (Wawancara pada tanggal 10 Januari 2025).

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan UMKM di Kalurahan Umbulharjo adalah bagaimana memberikan dukungan yang efektif kepada para pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan ekspansi pasar mereka. Salah satu inisiatif yang diambil adalah dengan memberikan anggaran Desa untuk ketahanan pangan, sebagian di antaranya dialokasikan untuk mendukung UMKM. Namun, tantangannya terletak pada kenyataan bahwa banyak pelaku UMKM masih beroperasi dalam pola lama, hanya

menjual produk mereka tanpa terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengembangan. Untuk mengatasi tantangan ini, langkah pertama yang diambil adalah menarik para pelaku UMKM untuk terlibat dalam kegiatan kolektif dan berkomunikasi aktif. Hal ini bertujuan untuk mengubah pola pikir mereka dari hanya menjual produk secara konvensional menjadi lebih proaktif dalam mencari pangsa pasar yang lebih luas. Misalnya, bagi UMKM yang bergerak dalam produksi kopi, mereka diarahkan untuk memahami proses dari hulu ke hilir dan menjual produknya dengan standar yang lebih tinggi. Upaya untuk mengatasi tantangan ini melibatkan berbagai komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah setempat, para pelaku UMKM, dan masyarakat. Salah satunya adalah melalui penyelenggaraan kegiatan tahunan seperti bazar UMKM yang memperkenalkan produk-produk unggulan dari UMKM kepada masyarakat dan bekerja sama dengan metode barcode untuk memperluas akses pasar. Menurut peneliti, UMKM di Kalurahan Umbulharjo didorong untuk berpikir jauh ke depan, bagaimana produk yang semula dijual dengan harga standar lokal bisa dikembangkan menjadi produk unggulan yang memiliki potensi untuk diekspor ke luar negeri. Ini menuntut kreativitas dalam pengembangan produk dan variasi untuk menarik minat konsumen yang lebih luas. Sebagai contoh, produk susu lokal tidak hanya dihasilkan dalam satu varian, melainkan dikembangkan menjadi beragam rasa dan jenis agar dapat menjangkau pangsa pasar yang lebih besar. Dengan demikian, UMKM di Kalurahan Umbulharjo diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi yang kuat dan berdaya saing di tingkat desa maupun kalurahan.

Dari berbagai pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa inisiasi institusi dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo, Kabupaten Sleman, memegang peranan penting dalam membentuk lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Melalui kolaborasi yang erat antara berbagai

institusi publik, pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas lokal, dan para pelaku UMKM, berhasil diciptakan sebuah ekosistem yang mendukung pengembangan UMKM secara ganzas dan berkelanjutan. Dukungan dalam bentuk pelatihan, bimbingan, regulasi yang mendukung, akses pasar yang lebih luas, dan kerjasama antar stakeholder menjadi pilar utama dalam memajukan UMKM di wilayah tersebut. Para pelaku UMKM di Kalurahan Umbulharjo memberikan tanggapan positif terhadap inisiatif dan dukungan yang diberikan oleh pihak terkait dalam pengembangan usaha mereka. Mereka menyambut baik program-program pelatihan dan bimbingan yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola UMKM. Dengan adanya edukasi mengenai pentingnya terlibat dalam kegiatan pengembangan dan berkomunikasi aktif, para pelaku UMKM merasa didorong untuk berpikir lebih proaktif dalam meningkatkan kualitas produk dan mencari peluang pasar yang lebih luas. Selain itu, melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan seperti bazar UMKM, para pelaku UMKM merasa didukung dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan eksposur produk mereka kepada masyarakat. Meskipun masih dihadapi oleh berbagai tantangan seperti kebiasaan lama dalam berusaha dan ekspansi pasar yang belum pasti, namun dengan adanya komitmen bersama serta upaya kolaboratif yang terus dilakukan, diharapkan UMKM lokal dapat terus berkembang, meningkatkan kualitas produk, dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian serta pembangunan wilayah Kalurahan Umbulharjo menuju masa depan yang lebih baik.

Gambar 3.1 Bimbingan Teknis Kerajinan Bambu Kalurahan Umbulharjo



(Sumber : Sid Kalurahan Umbulharjo 2024)

Kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) kerajinan bambu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan Umbulharjo. Informan yang relevan dalam kegiatan ini meliputi perangkat desa, pelaku usaha kerajinan bambu, serta pendamping dari instansi terkait seperti Dinas Perindustrian atau UMKM. Informan ini berperan dalam memberikan wawasan teknis mengenai pengolahan bambu, strategi pemasaran, serta pengembangan usaha berbasis bahan lokal guna meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

B. Keterlibatan Aktor Non Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM

Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY, merupakan salah satu aspek penting dalam pendekatan *collaborative governance*. Organisasi atau forum non-pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam memajukan sektor UMKM di wilayah tersebut. Dengan berbagai inisiatif dan kolaborasi yang dilakukan, aktor

non-pemerintah turut berperan dalam mendukung pertumbuhan serta penyelesaian masalah yang dihadapi UMKM di Kalurahan Umbulharjo.

Forum non-pemerintah yang terlibat dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo diketahui telah menjalin kerja sama yang erat dengan pemerintahan setempat. Kolaborasi antara organisasi non-pemerintah dan instansi pemerintah menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem UMKM di wilayah tersebut. Dengan saling mendukung dan berbagi sumber daya, baik dari segi pengetahuan maupun pendanaan, forum tersebut mampu menciptakan sinergi yang positif dalam mendorong pertumbuhan UMKM.

Tak hanya pada level kolaborasi, forum non-pemerintah juga berperan aktif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi UMKM di Kalurahan Umbulharjo. Melalui pendekatan partisipatif dan inklusif, organisasi atau forum tersebut turut serta dalam mencari solusi bagi permasalahan yang dihadapi UMKM, mulai dari masalah akses modal hingga pemasaran produk. Dengan demikian, keterlibatan aktor non-pemerintah bukan hanya sebatas memberikan bantuan, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis yang turut bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM.

Peran organisasi atau forum non-pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo juga dapat dilihat dari upaya-upaya konkret yang dilakukan. Mulai dari penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM, hingga fasilitasi dalam mengakses pasar yang lebih luas, forum non-pemerintah berperan sebagai penghubung yang menghubungkan berbagai pihak terkait demi kemajuan UMKM di wilayah tersebut. Dengan memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi UMKM secara langsung, organisasi atau forum

non-pemerintah mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkuat ekosistem UMKM dan mengangkat potensi-potensi lokal yang ada.

Secara keseluruhan, keterlibatan aktor non-pemerintah dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo mencerminkan komitmen yang kuat dalam membangun kerja sama yang berkelanjutan untuk kemajuan bersama. Dengan berbagai upaya kolaborasi, kontribusi nyata, dan peran yang proaktif, organisasi atau forum non-pemerintah turut memperkuat fundamental *collaborative governance* dalam mendukung pertumbuhan serta keberlanjutan UMKM di wilayah tersebut.

Berkaitan dengan keterlibatan aktor non-pemerintahan dalam pengembangan UMKM. Hal ini kemudian diterangkan lebih lanjut oleh Suranta, selaku sekretaris Kalurahan Umbulharjo, yakni :

“Ada yaitu FORKOM UMKM, FORKOM-nya ini non-pemerintahan semua jadi satu dengan pelaku UMKM-nya sudah ada SK FORKOM juga”. (Wawancara pada tanggal 10 Januari 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang keberadaan Forum Komunikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (FORKOM UMKM) di wilayah tersebut. FORKOM UMKM merupakan sebuah forum non-pemerintahan yang menjadi satu wadah bagi para pelaku UMKM untuk berkomunikasi, bertukar informasi, dan bekerja sama dalam mendukung pengembangan serta pemberdayaan UMKM di Kalurahan tersebut. Pentingnya FORKOM UMKM terlihat dari keberadaan Surat Keputusan (SK) yang mengatur dan melegitimasi keberadaan dan aktivitas FORKOM UMKM. Forum seperti FORKOM UMKM menjadi sarana yang penting dalam memperkuat kolaborasi antara pelaku UMKM, membangun jejaring bisnis, serta mendukung pertumbuhan UMKM secara kolektif. Dengan menjadi satu wadah komunikasi, pelaku UMKM memiliki akses lebih luas untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan mendukung satu sama lain dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam

menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut peneliti, SK FORKOM, keberadaan dan aktivitas FORKOM UMKM menjadi lebih terstruktur dan terorganisir. SK ini memberikan dasar hukum yang mengatur keberlangsungan dan tata kelola FORKOM UMKM, sehingga memastikan bahwa semua kegiatan dan inisiatif yang dilakukan dalam rangka mendukung UMKM dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Melalui FORKOM UMKM, diharapkan bahwa para pelaku UMKM dapat saling mendukung, bertukar informasi, serta melakukan kolaborasi bisnis yang memberikan manfaat bagi semua pihak terkait. Dengan adanya forum komunikasi dan kerjasama seperti FORKOM UMKM, diharapkan bahwa UMKM di wilayah tersebut dapat memperkuat posisinya, meningkatkan daya saing, dan memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Berkaitan dengan peran serta kontribusi aktor non pemerintahan dalam pengembangan UMKM. Hal ini kemudian diterangkan lebih lanjut oleh Suranta, selaku sekretaris Kalurahan Umbulharjo, yakni :

“Dari FORKOM tadi itu, setau saya mereka mempunyai kegiatan, misalnya seperti produk-produk itu dipacking. Packing itu juga ada penyuluhannya adapun produk-produk yang lain itu dibina. Kemarin disetiap produk UMKM itu ada barkodenya, jadi bisa diakses langsung melalui barcode tersebut”. (Wawancara pada tanggal 10 Januari 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang berbagai kegiatan yang dilakukan oleh FORKOM UMKM dalam mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas UMKM di wilayah tersebut. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh FORKOM UMKM adalah proses packing atau pengemasan produk-produk UMKM. Pengemasan ini tidak hanya sekadar penataan produk, tetapi juga dilengkapi dengan proses penyuluhan terkait cara pengemasan yang baik dan menarik bagi konsumen. Hal ini berperan penting dalam menarik minat dan meningkatkan daya tarik produk

UMKM di pasar. Selain pengemasan, FORKOM UMKM juga melakukan kegiatan pembinaan terhadap produk-produk UMKM lainnya. Proses pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, nilai tambah, dan daya saing produk UMKM. Para pelaku UMKM dibina dan diberikan pemahaman tentang teknik produksi, desain produk, manajemen usaha, serta strategi pemasaran yang efektif. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan produk-produk UMKM dapat lebih berkualitas dan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, implementasi sistem barcode pada setiap produk UMKM juga menjadi perhatian utama dari FORKOM UMKM. Barcode ini memiliki fungsi penting sebagai alat identifikasi dan pelacakan produk, sehingga konsumen dapat mengakses informasi detail mengenai produk secara langsung melalui barcode tersebut. Hal ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM, serta membantu meningkatkan visibilitas produk di pasar. Menurut peneliti, dengan melibatkan pelaku UMKM dalam proses packing, pembinaan produk, dan implementasi barcode, FORKOM UMKM berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM di wilayah tersebut. Melalui berbagai kegiatan ini, diharapkan UMKM dapat terus berkembang, meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal serta kesejahteraan pelaku UMKM.

Berkaitan dengan peran organisasi atau individu yang dianggap signifikan dalam mendukung UMKM. Hal ini kemudian diterangkan lebih lanjut oleh Suranta, selaku sekretaris Kalurahan Umbulharjo, yakni :

“Mereka melakukan pembinaan walaupun sebagiannya juga bersumber dari orangnya, dana Desa untuk pengembangan UMKM kami mengadakan banyak kegiatan, salah satunya seperti pameran. Kemudian pembinaan misalnya pengemasan yang baik bagaimana, jualnya gimana, sekarang udah dibikin kelompok. Itu nanti kalo ada pameran di Kabupaten Sleman jadi mereka bisa

ikut, kemarin yang terakhir pameran di UGM”. (Wawancara pada tanggal 10 Januari 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh FORKOM UMKM dalam memberikan pembinaan dan dukungan kepada para pelaku UMKM, dengan sebagian dana pengembangan bersumber dari pemerintah Desa. Melalui dana yang diterima, FORKOM UMKM mengadakan berbagai kegiatan pengembangan, salah satunya adalah penyelenggaraan pameran. Pameran merupakan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk-produknya, memperluas pasar, serta meningkatkan penjualan. Selain pameran, kegiatan pembinaan juga dilakukan oleh FORKOM UMKM, yang meliputi aspek-aspek seperti pengemasan yang baik, strategi pemasaran yang tepat, dan peningkatan kualitas produk. Pelaku UMKM dibimbing dalam hal teknik pengemasan produk yang menarik, strategi penjualan yang efektif, serta pengelolaan bisnis yang baik. Selain itu, mereka juga dikelompokkan untuk mendukung kolaborasi dan pertukaran informasi antar sesama pelaku UMKM. Adanya pembinaan dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku UMKM dalam menjalankan usaha mereka dengan lebih baik. Salah satu contoh implementasi dari pembinaan ini adalah saat para pelaku UMKM dibina untuk menyesuaikan pengemasan produk, cara pemasaran yang efektif, dan kemudian dibentuk kelompok-kelompok agar dapat saling mendukung dan belajar dari sesama. Dengan demikian, mereka akan menjadi lebih siap dan terampil dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Menurut peneliti, partisipasi dalam pameran di berbagai tempat, seperti di Kabupaten Sleman atau di UGM, memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan eksposur produk. Dengan demikian, melalui berbagai kegiatan pembinaan, pelatihan, dan pameran yang diadakan, FORKOM UMKM bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas para pelaku

UMKM di wilayah tersebut, sehingga mereka dapat menjadi lebih kompetitif, inovatif, dan sukses dalam menjalankan usaha mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan aktor non-pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Umbulharjo, Kabupaten Sleman, DIY, memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat ekosistem UMKM dan meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. Melalui Forum Komunikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (FORKOM UMKM) dan berbagai organisasi non-pemerintah lainnya, tercipta kolaborasi yang efektif untuk mendukung pertumbuhan, pemberdayaan, dan penyelesaian masalah yang dihadapi UMKM di wilayah tersebut. Berbagai kegiatan pembinaan, pelatihan, pameran, serta implementasi sistem barcode menjadi upaya konkret yang dilakukan aktor non-pemerintah untuk membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas produk, akses pasar, dan kemampuan manajerial. Dengan komitmen dan kontribusi yang diberikan, mereka memperkuat fundamental *collaborative governance* dalam hadirnya kerja sama yang berkelanjutan untuk kemajuan UMKM.

Gambar 3.2 Penghargaan Nata Sembada FORKOM UMKM Kalurahan Umbulharjo



(Sumber : Sid Kalurahan Umbulharjo 2024)

C. Partisipasi Langsung Dalam Pengembangan UMKM

Partisipasi langsung dalam pengembangan UMKM merupakan salah satu aspek kunci dari konsep *collaborative governance* dalam konteks pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY. Partisipasi langsung mencakup keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan, mulai dari pemilik UMKM itu sendiri, pemerintah setempat, hingga masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, partisipasi langsung menjadi sarana untuk memperkuat kolaborasi dan kerja sama antar berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan UMKM di wilayah tersebut.

Dalam implementasi *collaborative governance*, partisipasi langsung dapat terwujud melalui berbagai kegiatan dan mekanisme, seperti diskusi terbuka, pertemuan rutin antar pemangku kepentingan, pelibatan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan, hingga pembentukan kelompok kerja atau tim khusus untuk mempercepat pembangunan UMKM. Dengan adanya partisipasi langsung yang aktif dan inklusif, diharapkan tercipta lingkungan yang mendukung inovasi, berbagi pengetahuan, dan pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.

Para pemilik UMKM di Kalurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY juga diberikan ruang untuk berperan aktif dalam proses pengembangan UMKM melalui partisipasi langsung. Mereka dapat terlibat langsung dalam perumusan kebijakan, perencanaan strategis, penciptaan produk baru, hingga pemasaran bersama produk UMKM. Selain itu, pemerintah setempat juga dapat mendorong partisipasi langsung dengan memberikan pelatihan, pendampingan, serta akses ke pasar yang lebih luas bagi UMKM di wilayah tersebut.

Dengan demikian, partisipasi langsung dalam pengembangan UMKM menjadi fondasi utama dalam memperkuat kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak yang terlibat. Melalui keterlibatan aktif dan kesempatan berpartisipasi secara langsung, UMKM di Kalurahan Umbulharjo diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Setelah itu, partisipasi masyarakat atau kelompok lokal dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo sebagaimana diterangkan lebih lanjut oleh Sugeng Sunarto, selaku ulu-ulu Kalurahan Umbulharjo, yakni:

“Jadi kita itu kalau di kalurahan sudah berupaya semaksimal mungkin dalam rangka memfasilitasi terkait dengan UMKM yang ada di Umbulharjo contohnya terkait dengan legalitas dari produknya itu. Terkait dengan sumber dananya kita menganggarkan UMKM-nya ini dari kalurahan par tahunnya”. (Wawancara pada tanggal 10 Januari 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh pihak kalurahan, khususnya di wilayah Umbulharjo, dalam memberikan dukungan dan fasilitasi bagi UMKM yang beroperasi di daerah tersebut. Salah satu aspek yang ditekankan adalah terkait dengan legalitas produk-produk UMKM, di mana pihak kalurahan berupaya untuk memfasilitasi proses pengurusan legalitas produk agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk-produk UMKM yang dihasilkan memenuhi standar hukum dan kualitas yang diperlukan untuk dapat diperjualbelikan secara sah. Selain itu, dalam hal sumber pendanaan, pihak kalurahan juga turut menganggarkan dana untuk mendukung UMKM setiap tahunnya. Alokasi dana yang dialokasikan dari kalurahan tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan kepada UMKM dalam berbagai aspek, seperti pengembangan produk, pelatihan, pemasaran, atau infrastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM. Menurut peneliti,

dukungan dan fasilitasi dari pihak kalurahan, UMKM di wilayah Umbulharjo diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Upaya pengurusan legalitas produk dan alokasi dana yang tepat merupakan langkah awal yang penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Kolaborasi antara pihak kalurahan dengan pelaku UMKM merupakan modal penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem UMKM di daerah tersebut. Dengan adanya komitmen dan sinergi antara pihak kalurahan, UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya, diharapkan UMKM di Umbulharjo dapat terus berkembang, menciptakan lapangan kerja baru, serta memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui dukungan yang berkesinambungan, UMKM di wilayah tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Selanjutnya, partisipasi umum yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengembangan UMKM sebagaimana diterangkan lebih lanjut oleh Sugeng Sunarto, selaku ulu-ulu Kalurahan Umbulharjo, yakni:

“Mereka merespon dengan baik segala bentuk kegiatan yang diadakan misalnya kita menyampaikan standar UMKM misalnya produksi, kemasannya kesehatannya. Keterlibatan mereka dalam mengikuti kegiatan even UMKM”. (Wawancara pada tanggal 10 Januari 2025).

Pernyataan di atas menggambarkan respons positif dari para pelaku UMKM di wilayah tersebut terhadap segala bentuk kegiatan yang diadakan, terutama terkait dengan standar UMKM, produksi, kemasan, dan aspek kesehatan produk. Para pelaku UMKM menunjukkan keterlibatan aktif dan partisipasi dalam mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan, termasuk penyampaian standar UMKM, proses

produksi yang baik, perihal kemasan produk, dan menjaga aspek kesehatan dari produk yang dihasilkan. Salah satu contoh kegiatan yang disebutkan adalah penyampaian standar UMKM, di mana para pelaku UMKM diberikan pemahaman mengenai standar-standar yang harus dipenuhi dalam menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, menjaga keberlangsungan usaha, serta memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dalam industri UMKM. Selain itu, para pelaku UMKM juga terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan proses produksi, kemasan, dan aspek kesehatan produk. Mereka secara aktif mengikuti pelatihan dan *workshop* yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dalam proses produksi yang efisien, desain kemasan yang menarik, dan menjaga kebersihan serta kualitas produk yang diproduksi. Keterlibatan aktif para pelaku UMKM dalam kegiatan ini menunjukkan keseriusan dan komitmen mereka dalam meningkatkan mutu produk serta mematuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Menurut peneliti, partisipasi para pelaku UMKM dalam kegiatan even terkait UMKM juga mencerminkan semangat kolaborasi dan saling mendukung antar sesama pelaku UMKM. Melalui kegiatan ini, mereka memiliki kesempatan untuk membangun jaringan, berbagi pengalaman, dan memperluas wawasan terkait dengan dunia UMKM. Dengan demikian, partisipasi aktif para pelaku UMKM dalam kegiatan-kegiatan terkait UMKM menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam bersaing di pasar yang semakin kompleks. Melalui respons positif dan keterlibatan aktif para pelaku UMKM, diharapkan bahwa sektor UMKM di wilayah tersebut dapat terus berkembang, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta memperluas pasar yang dapat dijangkau. Dengan peningkatan kompetensi dan ketersediaan sumber daya yang memadai, UMKM di wilayah tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi

perekonomian lokal serta memberdayakan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Kemudian, hambatan dalam meningkatkan partisipasi langsung terhadap Masyarakat lokal di Kalurahan Umbulharjo sebagaimana diterangkan lebih lanjut oleh Sugeng Sunarto, selaku ulu-ulu Kalurahan Umbulharjo, yakni:

“Jadi kalau hambatan secara signifikan tidak begitu. Jadi kan ini eranya digital, SDM dari masing-masing UMKM itu dalam pemasaran secara online belum tentu semuanya bisa. Kalau di produksinya, mereka memiliki keahlian dalam produksi sendiri, jadi kita mengembangkan potensi yang ada artinya kalau misalnya ada ahlinya bikin ini ya kita support keahlian tersebut. Seandainya kita mengadakan pelatihan ini itu, kendalanya karna tidak cocok mungkin diproduksi mereka kadang kala beda-beda sehingga elemen itu akan mandek kendalanya ketika dia tidak ikut nanti elemen itu terputus diprogram. UMKM ini saat ini belum 100% menopang kehidupan masyarakat karna masih campur, UMKM-nya dipertanian jalan, dipariwisata maunya juga jalan, ini kita sulitnya mengkolaborasikan misalnya untuk usaha pertanian bagaimana menjadi produk UMKM itu yang menjadi kendalanya. Contoh kendala sampai sekarang belum bisa terpecahkan disini itu produk susu lokal. Susu ini selama ini kan hampir 90% terjualnya yang segar itu stok dari peternakan, nah harapan kami susu itu dari dulu bahan bakunya bisa di kelola dengan berbagai susu cair, hingga bubuk itu gak mudah karna biaya tinggi itulah harapan kami dari nilai jual plusnya. Dulu pernah kita itu support UMKM dengan potensi buah. Dulu pada saat itu yang paling banyak disini adalah buah nangka kita bikin sunting Nangka kita support terkait peralatan dan sebagainya setelah itu kendalanya bahan bakunya habis tidak ada karna bahan baku tidak mencukupi target, lalu kendala juga yang paling umum adalah para dikma pola pikir, sifatnya petani disuruh wirausaha juga beda, jiwanya orang itu peternak dipaksa juga gak bisa kecuali zaman sekarang”. (Wawancara pada tanggal 10 Januari 2025).

Pernyataan di atas menguraikan beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam menghadapi era digital saat ini. Dalam konteks pemasaran online, salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan SDM dari masing-masing UMKM dalam memanfaatkan platform digital untuk pemasaran. Meskipun pelaku UMKM memiliki keahlian dalam produksi, tidak semua dari mereka memiliki kemampuan atau pengetahuan yang cukup dalam memasarkan produk secara online. Keterlibatan dalam pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemasaran

online dapat menjadi langkah penting dalam mengatasi kendala ini. Namun, terdapat kendala baru yang muncul saat pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik produksi dari masing-masing UMKM. Ketika pelatihan tidak relevan dengan produk atau tidak sesuai dengan kebutuhan UMKM, hal ini dapat menyebabkan mandeknya proses pengembangan dan pemasaran online, karena elemen kunci dalam pemasaran tidak terhubung dengan program pelatihan yang dijalankan. Selain itu, kendala lain yang dihadapi oleh UMKM adalah diversifikasi usaha yang terkadang sulit untuk diintegrasikan menjadi produk UMKM yang kohesif. Contohnya, sulitnya mengkolaborasikan usaha pertanian ke dalam produk UMKM yang memiliki nilai tambah. Salah satu contoh kendala konkret yang disebutkan adalah terkait dengan produk susu lokal, di mana produksi susu cair atau bubuk masih dihadapkan pada kendala biaya yang tinggi dan keterbatasan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan transformasi bahan baku menjadi produk bernilai tambah merupakan tantangan yang perlu dipecahkan. Menurut peneliti, kendala lain yang muncul adalah terkait dengan peningkatan pola pikir dan keterampilan usaha di kalangan pelaku UMKM, terutama dalam sektor pertanian. Terdapat kesulitan dalam membuat transisi dari pola pikir petani menjadi wirausaha, yang memerlukan adaptasi dan pemahaman yang berbeda terhadap aspek bisnis dan manajemen usaha. Hal ini menunjukkan perlunya penyuluhan dan pendampingan yang komprehensif bagi para pelaku UMKM untuk dapat mengatasi kendala tersebut dan bersaing secara efektif dalam era ekonomi digital yang terus berkembang.

Selanjutnya, kendala - kendala yang dihadapi pelaku UMKM, dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut diterangkan lebih lanjut oleh Yoga, selaku pelaku UMKM di Kalurahan Umbulharjo, yakni :

“Di Sleman ini ada namanya wadah yaitu FORKOM UMKM, Sleman itu ada 17 Kapanewon, masing-masing Kapanewon tersebut ada FORKOM UMKM-Nya. Nah, sekarang jugsan dikasi dana buat bikin Event atau misalnya berkoordinasi sama pak Ulu-Ulu juga bisa, FORKOM ini baru beberapa anggota yang sudah bergabung, dan ini kita baru mau mencari anggota lagi untuk minta pelatihan lagi, kemudia mau bikin event promosi produk-produk UMKM juga, untuk supportnya dari Kalurahan biasanya ngasih-ngasih stimulus begitu. Terkait dengan peraturan Kalurahan dalam UMKM biasanya sudah ada dari peraturan Kabupaten, untuk peraturan Kalurahan secara tertulis belum ada. Terkait kegiatan-kegiatan FORKOM selain melakukan pelatihan rutin anggota sekali dalam satu bulan juga merencanakan RAPB misalnya bulan depan ada pelatihan buat kopi, pelatihan breeding dan sebagainya. Jadi, khusus buat anggota FORKOM Kalau pameran kemanan-mana itu FORKOM sudah menyediakan fasilitas misalnya rak tempat jualan jadi kita sebagai pelaku UMKM sudah tidak repot-repot lagi untuk cari tempat atau bawa tempat jualan sendiri.” Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Retno selaku UMKM pengelolaan susu, Bapak Kasno selaku UMKM kopi, Ibu Tiwi selaku UMKM tape dan ketan, Bapak Parman selaku UMKM pengelolaan batu”. (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang keberadaan FORKOM UMKM di Kabupaten Sleman. FORKOM UMKM merupakan wadah yang dibentuk di tingkat Kapanewon di Sleman, dengan masing-masing dari 17 Kapanewon memiliki FORKOM UMKM sendiri. Saat ini, FORKOM UMKM dalam tahap pengembangan dimana sedang mencari anggota baru untuk bergabung. Dana juga telah diberikan untuk mendukung berbagai kegiatan seperti penyelenggaraan event promosi produk-produk UMKM dan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pak Ulu-Ulu. Salah satu fokus utama dari FORKOM UMKM adalah memberikan pelatihan berkala kepada anggotanya. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan sekali dalam sebulan dan mencakup berbagai topik seperti pelatihan dalam bidang pembuatan kopi, teknik pembibitan, dan lain sebagainya. Selain itu, FORKOM UMKM juga merencanakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) untuk kegiatan-kegiatan mendatang guna mendukung pengembangan UMKM di Kapanewon tersebut. Terkait dengan peraturan UMKM di tingkat Kalurahan, peraturan tersebut biasanya sudah diatur dalam peraturan Kabupaten. Namun, secara tertulis, peraturan mengenai

UMKM di tingkat Kalurahan belum tersedia. Hal ini menunjukkan adanya potensi untuk lebih mengatur secara rinci operasional UMKM di tingkat yang lebih lokal tersebut. Selain kegiatan pelatihan dan pengembangan anggota, FORKOM UMKM Kapanewon juga memberikan fasilitas kepada anggotanya. Salah satu contohnya adalah penyediaan rak tempat jualan saat anggota UMKM ingin berpartisipasi dalam pameran atau event-promosi produk. Dengan adanya fasilitas ini, anggota UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan produk dan tidak perlu repot lagi mencari atau membawa tempat jualan sendiri. Dengan demikian, kehadiran FORKOM UMKM di Kabupaten Sleman menjadi sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM di tingkat lokal. Melalui berbagai kegiatan dan dukungan yang diberikan, diharapkan UMKM di Sleman dapat semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.

Hal ini, dapat disimpulkan bahwa partisipasi langsung dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY, memegang peranan kunci dalam memperkuat kolaborasi dan kerja sama antar berbagai pihak terkait. Melalui keterlibatan aktif dan inklusif dari para pemilik UMKM, pemerintah setempat, serta masyarakat sekitar, tercipta lingkungan yang mendukung inovasi, berbagi pengetahuan, dan pemberdayaan UMKM secara berkesinambungan. Meskipun terdapat kendala dan tantangan seperti keterbatasan pengetahuan dalam pemasaran online, diversifikasi usaha yang sulit diintegrasikan, dan pola pikir yang perlu diubah dari petani menjadi wirausaha, upaya-upaya pemerintah setempat dalam mendukung melalui FORKOM UMKM dan fasilitasi kegiatan-kegiatan pelatihan, pameran, serta regulasi yang lebih terinci menunjukkan komitmen untuk memperkuat sektor UMKM dan mengatasi hambatan yang dihadapi. Dengan demikian, melalui partisipasi langsung yang aktif

dan responsif, UMKM di Kalurahan Umbulharjo diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

D. Organisasi Forum Yang Formal Dalam Pengembangan UMKM

Organisasi forum yang formal memegang peran penting dalam menjalankan *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY. Forum yang formal merupakan wahana untuk merumuskan kebijakan, mengoordinasikan berbagai kegiatan, serta memfasilitasi dialog dan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan UMKM secara berkelanjutan.

Dalam konteks *collaborative governance*, organisasi forum yang formal biasanya terdiri dari perwakilan UMKM, pemerintah daerah, akademisi, lembaga keuangan, dan komunitas lokal. Forum ini memiliki struktur organisasi yang jelas, tata kelola yang transparan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif. Tujuan utama dari organisasi forum yang formal adalah untuk meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi antar anggotanya dalam mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan UMKM di wilayah tersebut.

Dalam praktiknya, organisasi forum yang formal dapat melakukan berbagai kegiatan, seperti rapat rutin untuk membahas isu-isu terkait pengembangan UMKM, penyelenggaraan pelatihan dan workshop untuk pemilik UMKM, penerbitan pedoman dan panduan terkait tatakelola UMKM yang baik, hingga kampanye promosi dan pemasaran bersama produk UMKM. Melalui forum yang formal, para pemangku kepentingan dapat saling berbagi informasi, pengalaman, serta sumber daya untuk mendukung pertumbuhan UMKM secara optimal.

Selain itu, organisasi forum yang formal juga dapat berperan sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan bersama para pemilik UMKM, mengadvokasi kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM, serta menjembatani kerjasama dengan berbagai pihak terkait di tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian, organisasi forum yang formal menjadi penggerak utama dalam membangun sinergi dan kolaborasi yang kokoh dalam memajukan sektor UMKM di Kalurahan Umbulharjo dan sekitarnya.

Dengan adanya organisasi forum yang formal yang kuat dan berfungsi dengan baik, diharapkan kolaborative governance dalam pengembangan UMKM di wilayah tersebut dapat terwujud secara optimal. Melalui kerja sama yang solid antara berbagai pemangku kepentingan melalui forum yang formal, UMKM di Kalurahan Umbulharjo diharapkan dapat berkembang dan bersaing secara global, memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Selanjutnya, Cara organisasi atau forum tersebut berkolaborasi dengan pemerintahan dalam pengembangan UMKM juga diterangkan lebih lanjut oleh Suranta, selalu sekretaris Kalurahan Umbulharjo, yakni :

“Mereka selalu koordinasi dengan kalurahan terutama kepada pak Ulu-Ulu, misalnya mereka menginginkan apa? Jadi nanti itu diajukan di FORKOM UMKM apa itu nanti diajukan di kegiatan MUSRENBANG dimasukkan di RKP, kita masukan di RBKAl untuk dana apa aja yang dibutuhkan oleh UMKM contoh tahun besok itu mereka untuk pelatihan produksi kerajinan batu, misalnya membuat cobe, ada pengembangannya dan pelatihannya jadi kami ajukan seperti itu, dan kita anggarakan ditahun ini, ada pameran juga itu nanti mereka koordinasikan dengan Kalurahan, ulu-ulu dan kita mencoba untuk membantu dana tersebut dengan menggunakan alokasi dana Desa untuk UMKM”. (Wawancara pada tanggal 10 Januari 2025).

Pernyataan di atas menggambarkan koordinasi yang dilakukan oleh FORKOM UMKM dengan pihak kalurahan, terutama melalui pak Ulu-Ulu, untuk mendukung

perkembangan UMKM di wilayah tersebut. Dalam proses koordinasi tersebut, pihak UMKM berdiskusi untuk memahami kebutuhan dan aspirasi mereka. Setelah itu, usulan atau keinginan dari UMKM tersebut akan diajukan ke dalam forum FORKOM UMKM untuk dibahas lebih lanjut. Usulan yang telah disetujui dalam forum FORKOM UMKM kemudian akan diajukan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Salah satu aspek penting dalam mendukung UMKM adalah alokasi dana yang diperlukan untuk pengembangan mereka. Usulan kegiatan dan alokasi dana yang dibutuhkan oleh UMKM akan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Alokasi Dana (RAD) untuk tahun berikutnya. Misalnya, untuk tahun depan, UMKM tersebut membutuhkan dana untuk pelatihan produksi kerajinan batu, seperti pembuatan cobe (cetakan batu). Proses pengajuan alokasi dana ini dilakukan melalui Rencana Belanja dan Kebutuhan (RBKal) untuk memastikan bahwa UMKM mendapatkan dukungan finansial yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, pameran juga menjadi salah satu kegiatan yang didorong oleh FORKOM UMKM untuk mempromosikan produk-produk UMKM kepada masyarakat. Menurut peneliti, pihak UMKM akan berkoordinasi dengan kalurahan dan pak Ulu-Ulu untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan pameran. Selain sebagai ajang promosi, pameran juga dapat menjadi sarana untuk memperluas jaringan dan meningkatkan penjualan produk UMKM. Untuk mendukung kegiatan pameran ini, pihak FORKOM UMKM berupaya untuk membantu dalam pengalokasian dana yang terkait dengan kegiatan pameran tersebut dengan menggunakan alokasi dana Desa yang telah disediakan khusus untuk mendukung UMKM. Dengan adanya kerjasama antara FORKOM UMKM, kalurahan, dan pemerintah Desa, diharapkan UMKM di wilayah tersebut dapat terus berkembang

dan berkontribusi secara signifikan dalam perekonomian lokal. Melalui proses koordinasi yang baik dan alokasi dana yang tepat, UMKM dapat mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk dapat bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif. Dengan demikian, sinergi antara berbagai pihak tersebut menjadi kunci dalam memajukan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Kemudian, bagaimana forum tersebut berkontribusi dalam menyelesaikan masalah UMKM di Kalurahan Umbulharjo diterangkan lebih lanjut oleh Suranta, selaku sekretaris Kalurahan Umbulharjo, yakni :

“Kebanyakan mereka juga sering koordinasi antar sesama anggota FORKOM, mereka komunikasikan kendalanya apa saja yang mereka hadapi dalam kegiatan UMKM, jadi dari pengurus FORKOM nanti akan membantu mereka yang memiliki kendala-kendala”. (Wawancara pada tanggal 10 Januari 2025).

Pernyataan di atas menggambarkan praktik kolaborasi dan komunikasi yang intensif antara anggota FORKOM UMKM. Para anggota FORKOM UMKM secara aktif terlibat dalam proses koordinasi dan berkomunikasi satu sama lain untuk saling berbagi informasi dan pendapat terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha UMKM mereka. Dalam konteks ini, pengurus FORKOM UMKM memainkan peran sentral dalam membantu anggota-anggota yang mengalami berbagai kendala dalam menjalankan usaha mereka. Menurut peneliti, Koordinasi dan komunikasi antar sesama anggota FORKOM UMKM memungkinkan pertukaran pengalaman dan pengetahuan antar pelaku UMKM. Ketika seorang anggota menghadapi kendala khusus dalam usahanya, mereka dapat berdiskusi dan berbagi masalah tersebut dengan anggota FORKOM UMKM lainnya. Pengurus FORKOM UMKM, sebagai fasilitator utama, akan turut berperan dalam membantu menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh anggota tersebut dengan

memberikan bimbingan, saran, atau arahan yang diperlukan. Dengan adanya kerjasama dan solidaritas di antara anggota FORKOM UMKM, mereka dapat saling mendukung dan memperkuat posisi satu sama lain. Berbagi pengalaman dan pengetahuan antara sesama anggota juga dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk terus berkembang dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha UMKM. Selain itu, melalui koordinasi yang terjalin dengan baik, anggota FORKOM UMKM dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan pengembangan UMKM secara kolektif.

Setelah itu, Peran organisasi atau forum untuk mendukung pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo sebagaimana diterangkan lebih lanjut oleh Suranta, selaku sekretaris Kalurahan Umbulharjo, yakni:

“Mereka selalu mengadakan kegiatan, pertemuan kemudian mereka saling koordinasi untuk produk-produk apa yang mereka ingin dan dikembangkan untuk lebih baik. Jadi FORKOM ini untuk membantu dalam hal memasarkan produk melalui pameran, produksi dalam membuka peluang bagi Masyarakat. FORKOM ini juga merupakan pelaku wisata mereka mengadakan kegiatan wisata yang mengunjungi tempat-tempat UMKM”. (Wawancara pada tanggal 10 Januari 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang peran FORKOM UMKM dalam mengadakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya pengembangan produk UMKM, memasarkan produk melalui pameran, serta membuka peluang bagi masyarakat dalam dunia usaha mikro, kecil, dan menengah. FORKOM UMKM berfungsi sebagai wadah kolaborasi dan koordinasi bagi para pelaku UMKM dalam upaya meningkatkan kualitas produk dan menjangkau pasar yang lebih luas. Salah satu kegiatan utama yang rutin diadakan oleh FORKOM UMKM adalah pertemuan antara anggota untuk mendiskusikan produk-produk apa yang ingin mereka kembangkan agar lebih baik. Melalui forum ini, para pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk saling berbagi ide, pengalaman, dan strategi

dalam mengembangkan produk mereka. Dengan adanya diskusi dan koordinasi ini, diharapkan produk UMKM dapat terus ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan kebutuhan pasar dan tuntutan konsumen. Selain itu, FORKOM UMKM juga berperan penting dalam memasarkan produk-produk UMKM melalui kegiatan pameran. Pameran menjadi salah satu sarana yang efektif untuk memperkenalkan produk-produk UMKM kepada masyarakat luas dan memperluas jangkauan pasar. Dengan dukungan dari FORKOM UMKM, para pelaku UMKM dapat berpartisipasi dalam berbagai pameran yang diselenggarakan, sehingga produk-produk mereka dapat semakin dikenal dan diminati oleh konsumen. Menurut peneliti, Selain fokus pada pengembangan produk dan pemasaran, FORKOM UMKM juga turut berperan sebagai pelaku wisata dengan mengadakan kegiatan wisata yang mengunjungi tempat-tempat UMKM. Kegiatan wisata ini tidak hanya menjadi sarana untuk memberikan pengalaman baru bagi anggota FORKOM UMKM tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM. Melalui kegiatan wisata ini, masyarakat dapat lebih mengapresiasi keragaman produk UMKM yang ada di wilayah tersebut dan turut mendukung perkembangannya melalui pembelian produk-produk tersebut. Dengan demikian, FORKOM UMKM tidak hanya berperan dalam pengembangan produk dan pemasaran, tetapi juga sebagai agen penggerak dalam mengembangkan potensi pariwisata lokal melalui promosi dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Melalui kolaborasi dan kerjasama yang baik antara anggota FORKOM UMKM, diharapkan UMKM dapat terus berkembang, bersaing secara sehat, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian serta pembangunan wilayah mereka.

Kemudian, keterlibatan pemerintah dalam kegiatan di dalam forum, pendanaan kegiatan, serta keterlibatan pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan diterangkan lebih lanjut oleh Anton selaku ketua FORKOM, yakni :

“Khususnya di Kabupaten Sleman terdapat peraturan Bupati yang mengatur itu, Peraturan Nomor 9 Tahun 2022 tentang pembentukan FORKOM UMKM. FORKOM UMKM itu ada di tingkat Kalurahan, Kapanewon dan Kabupaten, itupun peraturan tersebut sudah kita usulkan untuk direvisi ulang. Nah, kembali lagi khususnya di wilayah Kalurahan Umbulharjo, FORKOM itu telah berdiri sejak Tahun 2021 sampai saat ini. kemudian untuk tugas-tugas FORKOM itu melakukan pendampingan pemberdaya UMKM di wilayah Kalurahan, selanjutnya untuk menjalin hubungan kerja sama atau komunikasi dengan pihak Kalurahan, membuka komunikasi dan kerja sama dengan pihak ketiga, pihak ketiga itu bisa berkenan terkait kerja sama pendanaan, permodalan atau terkait yang berkaitan dengan akses pasar. Tapi untuk kegiatan ke dalam internal organisasi itu juga ada, jadi penguatan kelembagaan, penguatan anggota, kemudian ada pelatihan-pelatihan anggota misalnya untuk packaging dan cara penggunaan teknologi tempat guna dan lain sebagainya. Kebetulan Kalurahan Umbulharjo menjadi salah satu yang sudah saya kenal, kalau penjangkaran dengan Collaboratif Governance itu tadi FORKOM tersebut yang dilibatkan secara aktif, baik itu komunikasi dengan pak Lurah, khususnya saya sebagai ketua FORKOM aktif sekali misalnya, kendala-kendala dalam program, atau kendala kegiatan apa saja mesti selalu komunikasi dengan Pak Lurah. Nah, dalam waktu dekat ini kita sedang merencanakan pengelolaan untuk kawasan padukuhan plosokerep, sambisari, plosorejo terkait kerajinan batu yang akan dilaksanakan pada tahun ini (2025). untuk institusi akademiknya dari UGM, prasagama Nusantara. Kemudian kita juga untuk pembelian kita gandeng pihak-pihak dari ketiga investor, kemudian ada juga tim menajemennya kita garap gandeng dalam mencari organisasi non pemerintahan yang bergerak dalam pendampingan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sleman. Terkait dengan pendanaan, betul pendanaan dari Kalurahan itu sudah ada sejak tahun 2021 sampai saat ini.” Pernyataan ini didukung oleh tokoh masyarakat yang mendukung UMKM di Kalurahan Umbulharjo yaitu: Nur, Ngadiyo, Winarto, dan Andi Suryono”. (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2025).

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa keberadaan dan peran Forum Komunikasi UMKM (FORKOM UMKM) di Kabupaten Sleman, khususnya di wilayah Kalurahan Umbulharjo. Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2022 telah ditetapkan untuk membentuk FORKOM UMKM di tingkat Kalurahan, Kapanewon, dan Kabupaten, yang saat ini sedang direvisi. Di Kalurahan Umbulharjo, FORKOM UMKM telah aktif sejak tahun 2021 dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di

wilayah tersebut. Salah satu tujuan utama FORKOM UMKM adalah melakukan pendampingan dan pemberdayaan UMKM di Kalurahan. Hal ini dilakukan dengan menjalin hubungan kerja sama dan komunikasi yang baik dengan pihak Kalurahan, serta membuka kerja sama dengan pihak ketiga seperti investor, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintahan terkait. Kolaborasi dengan berbagai pihak tersebut dapat mencakup kerja sama dalam hal pendanaan, permodalan, akses pasar, dan pengembangan keterampilan serta teknologi bagi para anggota UMKM. Selain fokus eksternalnya, FORKOM UMKM juga melakukan kegiatan internal untuk memperkuat kelembagaan dan anggota-anggotanya. Ini termasuk pelatihan bagi anggota UMKM dalam hal seperti proses packing, penggunaan teknologi, manajemen usaha, dan lain sebagainya. Dengan demikian, FORKOM UMKM tidak hanya berperan sebagai penghubung antara UMKM dan berbagai pihak terkait, tetapi juga sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan UMKM secara internal. Dalam konteks Kalurahan Umbulharjo, FORKOM UMKM telah terlibat secara aktif dalam proses *Collaborative Governance*, di mana kolaborasi antara FORKOM dan pihak-pihak terkait, termasuk Lurah wilayah setempat, sangat penting. Sebagai ketua FORKOM, keterlibatan aktif dalam menjalin komunikasi dengan Lurah dalam mengatasi kendala-kendala program dan kegiatan UMKM menjadi kunci keberhasilan. Komitmen untuk terus berkomunikasi dan bekerja sama dengan pihak terkait menjadi landasan utama dalam menjalankan setiap inisiatif dan program yang melibatkan UMKM di Kalurahan Umbulharjo.

Kesimpulan dari hal tersebut, menunjukkan bahwa organisasi forum yang formal, seperti FORKOM UMKM di Kalurahan Umbulharjo, memiliki peran yang sangat vital dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penerapan *collaborative governance*. Melalui struktur organisasi yang jelas

dan mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif, FORKOM UMKM berhasil mengoordinasikan berbagai kegiatan, memfasilitasi dialog antara pemangku kepentingan, serta mengadvokasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM. Keterlibatan aktif pemerintah, akademisi, dan pelaku UMKM dalam forum ini menciptakan sinergi yang kuat, memungkinkan pertukaran informasi, pengalaman, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh UMKM. Dengan adanya dukungan pendanaan, pelatihan, dan kegiatan promosi seperti pameran, FORKOM UMKM tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan daya saing produk lokal, tetapi juga dalam memperkuat jaringan sosial dan ekonomi di tingkat lokal, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Gambar 3.3 Pelayanan Pendaftaran Produk Halal dan BPOM Kalurahan Umbulharjo



(Sumber : Sid Kalurahan Umbulharjo 2024)

E. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Konsensus Dalam Pengembangan UMKM

Pengambilan keputusan berdasarkan konsensus menjadi salah satu prinsip utama dalam penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY. Konsep pengambilan keputusan berdasarkan konsensus menggaris bawahi pentingnya mencapai kesepakatan bersama antara berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM.

Dalam praktek *collaborative governance*, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus melibatkan proses dialog, negosiasi, dan musyawarah antara semua pihak yang terlibat. Setiap pemangku kepentingan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kebutuhan, serta aspirasi mereka sehingga dapat dicapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Keputusan yang diambil berdasarkan konsensus memungkinkan adanya legitimasi yang kuat dan dukungan yang luas dari seluruh anggota forum atau organisasi terkait.

Dalam konteks pengembangan UMKM, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus dapat berlangsung dalam berbagai tingkatan, mulai dari perumusan kebijakan strategis, alokasi sumber daya, hingga implementasi program-program pengembangan UMKM. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan UMKM di wilayah Kalurahan Umbulharjo.

Selain itu, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus juga memperkuat kerjasama dan kolaborasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan

UMKM. Dengan proses pengambilan keputusan yang inklusif dan transparan, diharapkan dapat tercipta hubungan saling percaya antara pemilik UMKM, pemerintah daerah, lembaga keuangan, akademisi, dan komunitas lokal. Hal ini juga dapat membantu mengatasi potensi konflik kepentingan dan menciptakan lingkungan kerja sama yang harmonis.

Dengan demikian, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus menjadi pilar penting dalam menjalankan *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY. Melalui proses yang partisipatif dan inklusif ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan dampak positif dari upaya pengembangan UMKM tersebut, serta memberikan manfaat yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Selanjutnya, keputusan berdasarkan consensus dalam pengembangan UMKM juga diterangkan lebih lanjut oleh Dian, selaku Sekertaris BPKal Umbulharjo, yakni :

“Terkait dengan SK UMKM, jadi pengembangan UMKM kalau SK itu belum pernah mengeluarkan SK terkait dengan UMKM, tetapi kita mendukung penuh kegiatan UMKM yang dilakukan di Kalurahan Umbulharjo seperti pameran pengembangan dan potensi-potensi yang ada di Kalurahan Umbulharjo, dan itu dilakukan setiap tahun”. (Wawancara pada tanggal 10 Januari 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang dukungan yang diberikan terkait dengan UMKM di Kalurahan Umbulharjo, meskipun belum ada penerbitan Surat Keputusan (SK) khusus terkait UMKM. Meskipun belum ada SK resmi yang dikeluarkan terkait dengan UMKM, pihak terkait mendukung sepenuhnya kegiatan yang dilakukan oleh UMKM di Kalurahan Umbulharjo. Dukungan ini mencakup berbagai kegiatan seperti pameran, pengembangan, dan eksplorasi potensi-potensi yang terdapat di Kalurahan Umbulharjo, yang rutin dilakukan setiap tahun. Meskipun belum ada SK resmi yang secara khusus mengatur UMKM di Kalurahan Umbulharjo,

dukungan penuh terhadap kegiatan UMKM merupakan langkah penting dalam memberikan kesempatan dan ruang bagi para pelaku UMKM untuk bertumbuh dan berkembang. Melalui partisipasi dalam kegiatan pameran, pelatihan, dan pengembangan potensi, para pelaku UMKM dapat lebih dikenal dan mampu meningkatkan kualitas produk serta pemasaran mereka. Pameran dan kegiatan ekspose potensi di Kalurahan Umbulharjo yang diadakan setiap tahun merupakan wadah yang penting untuk memperkenalkan UMKM kepada masyarakat lebih luas serta memperluas pangsa pasar mereka. Melalui kegiatan ini, para pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk memamerkan produk-produk unggulan mereka, berinteraksi langsung dengan calon konsumen, serta menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan kapasitas dan potensi usaha mereka. Menurut peneliti, meskipun belum ada SK UMKM yang terbit, namun komitmen dan dukungan yang kontinyu dari pihak terkait telah menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo. Dengan adanya kolaborasi antara UMKM, pemerintah setempat, dan berbagai pihak terkait, diharapkan UMKM di wilayah tersebut dapat semakin berkembang, memberikan kontribusi dalam perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, proses pengambilan keputusan terkait program pengembangan UMKM juga diterangkan lebih lanjut oleh Dian, selaku Sekertaris BPKal Umbulharjo, yakni :

“Biasanya kita ada koordinasi UMKM yang ada disitu melalui rapat yang dihadiri oleh BPKal dan pemerintahan Kalurahan. Sehingga bisa Untuk memberiksan Keputusan yang bermanfaat bagi Masyarakat atau pelaku UMKM”. (Wawancara pada tanggal 10 Januari 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang praktik koordinasi dan rapat yang dilakukan untuk membahas isu-isu terkait UMKM di Kalurahan. Pada umumnya, terdapat koordinasi yang dilakukan melalui rapat yang dihadiri oleh Badan Perwakilan Kalurahan (BPKal) dan pemerintahan Kalurahan. Melalui rapat tersebut, para pemangku kepentingan terkait UMKM dapat bertemu, berdiskusi, dan merumuskan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat atau pelaku UMKM di Kalurahan tersebut. Partisipasi BPKal dan pemerintahan Kalurahan dalam rapat koordinasi UMKM menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung dan memajukan sektor UMKM di wilayah Kalurahan. Dalam rapat tersebut, para pemangku kepentingan berkesempatan untuk menyampaikan masalah, tantangan, serta usulan terkait pengembangan UMKM di Kalurahan. Diskusi yang terbuka dan dialog yang produktif diharapkan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Menurut peneliti, adanya koordinasi dan rapat yang melibatkan BPKal dan pemerintahan Kalurahan, diharapkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil akan didasarkan pada masukan dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung dengan UMKM. Proses ini memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil dapat memberikan dampak positif, mendukung pertumbuhan UMKM, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi para pelaku UMKM. Koordinasi melalui rapat yang melibatkan berbagai stakeholder merupakan langkah penting dalam menjaga kesinambungan dan perkembangan UMKM di Kalurahan. Dengan sinergi antara BPKal, pemerintahan Kalurahan, dan pelaku UMKM, diharapkan bahwa sektor UMKM dapat terus berkembang, melakukan inovasi, dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian lokal serta kesejahteraan masyarakat di Kalurahan tersebut.

Selanjutnya, konsensus menjadi prinsip terutama dalam pengambilan Keputusan juga diterangkan lebih lanjut oleh Dian, selaku Sekertaris BPKal Umbulharjo, yakni :

“Yang jelas intinya dapat bermanfaat dan disepakati oleh yang hadir pada saat itu, ada BPKal, terus ada pemerintah Kalurahan dan ada pelaku-pelaku UMKM ketika sudah disepakati hasilnya baru bisa disahkan oleh pemerintahan Kalurahan.” (Wawancara pada tanggal 10 Januari 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan terkait UMKM di Kalurahan yang melibatkan berbagai pihak terkait seperti Badan Perwakilan Kalurahan (BPKal), pemerintah Kalurahan, dan pelaku UMKM. Inti dari proses ini adalah penerimaan manfaat dan kesepakatan dari semua pihak yang hadir saat rapat atau pertemuan koordinasi. Keberadaan BPKal, pemerintah Kalurahan, dan pelaku UMKM dalam proses pengambilan keputusan memastikan partisipasi semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap UMKM. Dalam proses rapat atau pertemuan koordinasi, semua pihak yang hadir berdiskusi, memberikan masukan, dan mencapai kesepakatan bersama terkait kebijakan atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung UMKM di Kalurahan. Dengan adanya perwakilan dari BPKal, pemerintah Kalurahan, dan pelaku UMKM, diharapkan bahwa pembahasan dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masing-masing pihak sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh komunitas UMKM. Menurut peneliti, setelah tercapai kesepakatan bersama, hasil keputusan yang dihasilkan dari rapat koordinasi perlu disahkan oleh pemerintahan Kalurahan. Prosedur ini bertujuan untuk menjadikan keputusan yang disepakati sebagai kebijakan resmi yang dapat dilaksanakan dan menjadi panduan bagi pelaksanaan program atau kegiatan yang mendukung pengembangan UMKM di Kalurahan tersebut. Proses penyetujuan dan penegasan keputusan oleh pemerintah Kalurahan memastikan bahwa keputusan tersebut secara hukum dan administratif

diakui dan diterapkan secara efektif. Dengan demikian, melalui proses partisipatif ini, diharapkan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Kalurahan. Dukungan, kesepakatan, dan persetujuan yang diperoleh dari berbagai pihak yang terlibat memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam upaya mendorong pertumbuhan dan kesuksesan UMKM, serta melakukan langkah-langkah konkret untuk memberdayakan pelaku UMKM lokal.

Dengan demikian, hal ini dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan berdasarkan konsensus menjadi landasan penting dalam collaborative governance dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY. Melalui proses partisipatif, inklusif, dan transparan ini, tercipta legitimasi yang kuat dan dukungan luas dari seluruh pemangku kepentingan terkait. Praktik pengambilan keputusan berdasarkan konsensus memperkuat kerjasama, kolaborasi, dan meminimalisir konflik kepentingan, menciptakan lingkungan kerja sama yang harmonis. Dukungan penuh terhadap kegiatan UMKM, koordinasi rapat antara BPKal, pemerintahan Kalurahan, dan pelaku UMKM, serta kesepakatan bersama dalam menghasilkan kebijakan dan program-program pengembangan UMKM menjadi kunci sukses dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pendorong inovasi dan daya saing UMKM di Kalurahan Umbulharjo.

F. Fokus Pada Kebijakan Publik Dalam Pengembangan UMKM

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Di Indonesia, UMKM

menjadi salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, kebijakan publik yang mendukung perkembangan UMKM menjadi sangat vital. Dalam konteks penelitian judul skripsi *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, fokus pada kebijakan publik dalam pengembangan UMKM memegang peranan kunci dalam memahami bagaimana pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan terlibat dalam mendukung pertumbuhan UMKM di wilayah tersebut.

Kebijakan publik yang efektif dalam pengembangan UMKM tidak hanya mencakup aspek regulasi dan perizinan, tetapi juga melibatkan berbagai program dukungan, insentif, serta kerjasama antara pemerintah, pelaku UMKM, dan lembaga terkait lainnya. Dengan adanya kerangka kerja *collaborative governance*, diharapkan tercipta sinergi antara semua pihak yang terlibat dalam mengembangkan UMKM sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Kalurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.

Setelah itu, kebijakan publik yang ada untuk mendukung pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo sebagaimana diterangkan lebih lanjut oleh Dian, selaku Sekertaris BPKal, yakni:

“Terkait dengan kebijakan, ada PERKAL terkait dengan UMKM kemudian ada SK dari pemerintah Kalurahan tentang kepengurusan UMKM, jadi legalnya sudah ada, makan tidak berdiri ibaratnya jika belum ada SK, tapi sekarang semua harus sudah ada Sk dari pemerintahan Kalurahan. Kalau untuk dari BPKal-nya sendiri mungkin membahas soal nanti rancangan peraturan Kalurahan terkait dengan UMKM-nya seperti apa jika memang kita sudah sepakat baru disahkan dan juga ada musyawarah Kalurahan, misalnya terkait dengan kepengurusannya itu nanti, biasanya ada musyawarah kita yang dihadirkan disitu”. (Wawancara pada tanggal 10 Januari 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang pentingnya keberadaan kebijakan dan regulasi terkait UMKM di Kalurahan, yang antara lain mencakup Peraturan

Kalurahan (PERKAL) yang berkaitan dengan UMKM dan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah Kalurahan tentang kepengurusan UMKM. Keberadaan PERKAL dan SK tersebut merupakan langkah penting dalam memberikan dasar hukum yang jelas dan memberikan legalitas resmi terhadap keberadaan dan kegiatan UMKM di Kalurahan. Dengan adanya PERKAL terkait UMKM dan SK dari pemerintah Kalurahan, maka segala kegiatan yang dilakukan oleh UMKM telah memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM di Kalurahan beroperasi secara resmi dan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pentingnya memiliki PERKAL dan SK adalah untuk memastikan bahwa UMKM memiliki legal standing yang jelas dan dapat melaksanakan kegiatan usaha mereka dengan aman dan terlindungi. Menurut peneliti, Proses perumusan dan penetapan regulasi terkait UMKM juga melibatkan Badan Perwakilan Kalurahan (BPKal). Melalui diskusi di BPKal, dipertimbangkan rancangan peraturan Kalurahan terkait UMKM yang akan diberlakukan. Setelah tercapai kesepakatan, regulasi tersebut baru dapat disahkan dan dilaksanakan. Selain itu, proses musyawarah Kalurahan juga menjadi forum penting untuk membahas berbagai hal terkait dengan kepengurusan UMKM, di mana keputusan tersebut dapat dirumuskan dan disetujui bersama. Dengan adanya PERKAL, SK, dan proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak terkait, diharapkan bahwa pengelolaan UMKM di Kalurahan dapat berjalan secara teratur, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Regulasi yang jelas dan mendukung pengembangan UMKM akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kalurahan, serta memberikan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usaha mereka.

Setelah itu, kebijakan yang diimplementasikan di Kalurahan Umbulharjo sebagaimana diterangkan lebih lanjut oleh Dian, selaku Sekertaris BPKal Umbulharjo, yakni:

“Ada surat Keputusan, peraturan Kalurahan”. (Wawancara pada tanggal 10 Januari 2025).

Pernyataan di atas menjelaskan tentang keberadaan Surat Keputusan (SK) dan Peraturan Kalurahan yang menjadi dasar hukum dalam mengatur dan mengelola UMKM di wilayah Kalurahan. SK dan Peraturan Kalurahan merupakan instrumen legal yang diterbitkan oleh pemerintahan Kalurahan untuk memberikan kerangka regulasi yang jelas terkait dengan kegiatan UMKM. Peraturan Kalurahan Umbulharjo pada BAB VII Kebijakan Umum terdapat Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah. Surat Keputusan (SK) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kalurahan terkait dengan kepengurusan UMKM. SK ini berisi penunjukan kepengurusan UMKM, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota kepengurusan, dan aturan-aturan lain yang berlaku dalam pengelolaan UMKM. Dengan adanya SK, maka kepengurusan UMKM memiliki landasan hukum yang sah dan terstruktur untuk melaksanakan tugasnya dalam mengelola UMKM. Selain SK, Peraturan Kalurahan merupakan kebijakan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintahan Kalurahan terkait dengan berbagai aspek UMKM, seperti prosedur pendirian, perizinan, pengembangan, dan pengawasan usaha UMKM. Dalam hal ini, Peraturan Kalurahan memberikan pedoman yang mengatur segala aktivitas dan operasional UMKM, sehingga segala tindakan yang diambil oleh UMKM harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kalurahan. Menurut peneliti, SK dan Peraturan Kalurahan, maka UMKM di wilayah Kalurahan memiliki pedoman yang jelas, transparan, dan sah secara hukum dalam menjalankan kegiatannya. Keberadaan regulasi yang kuat juga memberikan perlindungan,

kepastian, dan dukungan kepada pelaku UMKM dalam menjalankan usaha mereka dengan tertib, sesuai aturan, dan berkontribusi positif bagi pengembangan ekonomi lokal. Oleh karena itu, implementasi dan kepatuhan terhadap SK dan Peraturan Kalurahan menjadi hal yang penting untuk menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM di wilayah tersebut.

Setelah itu, kebijakan yang dianggap perlu diperbaiki atau diusulkan untuk lebih mendukung UMKM di Kalurahan Umbulharjo sebagaimana diterangkan lebih lanjut oleh Dian selaku Sekertaris BPKal Umbulharjo, yakni:

“Terkait dengan hal tersebut nanti bagaimana UMKM itu bisa berjalan dengan baik, kalau selama ini artinya sudah berjalan dengan baik, cuma kadang ada beberapa yang memang harus diperbaiki. Misalnya kegiatan-kegiatan itu kita harus menyesuaikan pasar, dulu kita itu belum menyesuaikan dengan pasar, jadi peminatnya itu masih kurang. Kalau kedepan mungkin kita akan perbaharui begitu. Yang jelas kami BPKal sangat setuju mendukung penuh kegiatan UMKM yang ada di Kalurahan Umbulharjo”. (Wawancara pada tanggal 10 Januari 2025).

Pernyataan di atas menyoroti pentingnya upaya perbaikan dan penyesuaian terhadap kegiatan UMKM di Kalurahan agar dapat berjalan dengan lebih baik. Meskipun sebagian besar kegiatan UMKM telah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan disempurnakan guna meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM di pasar. Salah satu contoh yang disebutkan adalah perlunya menyesuaikan kegiatan UMKM dengan pasar yang ada, karena saat ini peminat terhadap produk UMKM masih terbilang kurang. Adanya penyesuaian terhadap pasar merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya tarik produk UMKM dan menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Dengan melakukan pembaruan atau perbaikan, diharapkan UMKM akan mampu menarik perhatian lebih banyak konsumen, meningkatkan penjualan, serta memperluas pangsa pasar. Perbaikan dan penyesuaian ini menjadi langkah penting untuk memastikan

keberhasilan dan keberlanjutan usaha UMKM di Kalurahan. Selain itu, dukungan yang diberikan oleh Badan Perwakilan Kalurahan (BPKal) juga menjadi kunci dalam memajukan kegiatan UMKM di Kalurahan Umbulharjo. Dukungan dan persetujuan penuh dari BPKal menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung penuh perkembangan dan kesuksesan UMKM di wilayah tersebut. Melalui dukungan ini, diharapkan UMKM dapat terus berkembang, mampu bersaing dengan lebih baik, dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan. Menurut peneliti, upaya perbaikan, penyesuaian terhadap pasar, dan dukungan yang diberikan oleh BPKal merupakan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM di Kalurahan Umbulharjo. Dengan kerjasama dan kolaborasi yang kuat antara pelaku UMKM, pemerintah Kalurahan, dan BPKal, diharapkan UMKM dapat terus berkembang, berhasil, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh komunitas UMKM dan masyarakat setempat.

Dapat disimpulkan bahwa, kebijakan publik yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Keberadaan Peraturan Kalurahan (PERKAL) dan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah Kalurahan memberikan landasan hukum yang jelas dan terstruktur bagi pengelolaan UMKM, memungkinkan pelaku UMKM untuk beroperasi secara resmi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses musyawarah Kalurahan dan kolaborasi antara Badan Perwakilan Kalurahan (BPKal) dan pelaku UMKM menjadi kunci dalam merumuskan regulasi yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Meskipun UMKM di wilayah ini telah menunjukkan perkembangan yang baik,

terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap kegiatan usaha agar lebih sesuai dengan permintaan pasar, guna meningkatkan daya tarik dan daya saing produk UMKM. Kebijakan publik yang mendukung pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah. Keberadaan Peraturan Kalurahan (PERKAL) dan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah Kalurahan memberikan landasan hukum yang jelas dan terstruktur bagi pengelolaan UMKM, sementara proses musyawarah Kalurahan dan kolaborasi antara Badan Perwakilan Kalurahan (BPKal) dan pelaku UMKM menjadi kunci dalam merumuskan regulasi yang relevan. Meskipun UMKM di wilayah ini telah menunjukkan perkembangan yang baik, masih terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap kegiatan usaha agar lebih sesuai dengan permintaan pasar. Dukungan penuh dari BPKal dan upaya perbaikan yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian lokal, sehingga memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan terkait *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kalurahan Umbulharjo, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kolaborasi antara pemerintah, aktor non-pemerintah, dan pelaku UMKM sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Kalurahan Umbulharjo, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.

1. Inisiasi Pemerintah Kalurahan Umbulharjo dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, memiliki peran yang sangat strategis dan krusial dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Melalui kolaborasi antara pemerintah kalurahan, komunitas lokal, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, berbagai program pelatihan, pendampingan, serta kebijakan yang mendukung telah diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas produk dan akses pasar bagi pelaku UMKM. Meskipun tantangan dalam mengubah pola pikir dan praktik bisnis pelaku UMKM masih ada, upaya kolaboratif yang dilakukan melalui Forum Komunikasi (FORKOM) dan kerjasama dengan berbagai stakeholder menunjukkan potensi besar untuk mendorong inovasi, daya saing, dan keberlanjutan UMKM di wilayah tersebut. Dengan demikian, inisiasi institusi publik tidak hanya berfungsi sebagai penggerak, tetapi juga sebagai fasilitator yang

menghubungkan berbagai sumber daya dan keahlian untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan ekonomi lokal.

2. Keterlibatan aktor non-pemerintah, khususnya melalui Forum Komunikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (FORKOM UMKM), memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Melalui kolaborasi yang erat dengan pemerintah setempat, FORKOM UMKM tidak hanya berfungsi sebagai wadah komunikasi bagi pelaku UMKM, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memberikan pelatihan, pembinaan, dan dukungan akses pasar yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Kegiatan konkret seperti pengemasan produk, penyuluhan, dan penyelenggaraan pameran menunjukkan komitmen aktor non-pemerintah dalam memberdayakan pelaku UMKM, serta menciptakan sinergi yang positif dalam ekosistem UMKM. Dengan demikian, keterlibatan aktor non-pemerintah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penguatan ekonomi berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Partisipasi langsung dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, merupakan elemen kunci dalam menerapkan konsep collaborative governance. Keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemilik UMKM, pemerintah setempat, dan masyarakat, telah menciptakan sinergi yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Melalui berbagai mekanisme partisipatif, seperti pelatihan, pembinaan, dan penyelenggaraan event promosi, para pelaku UMKM diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan mengakses sumber daya yang diperlukan. Meskipun terdapat tantangan,

seperti keterbatasan pengetahuan dalam pemasaran digital dan kesulitan dalam mengintegrasikan usaha pertanian ke dalam produk UMKM, upaya kolaboratif yang dilakukan oleh FORKOM UMKM dan dukungan dari pemerintah kalurahan menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberdayakan pelaku UMKM. Dengan demikian, partisipasi langsung tidak hanya memperkuat ekosistem UMKM, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal dan pengembangan perekonomian daerah secara keseluruhan.

4. Organisasi forum yang formal, seperti Forum Komunikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (FORKOM UMKM), memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Melalui struktur organisasi yang jelas dan mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif, FORKOM UMKM berhasil menjembatani komunikasi antara pelaku UMKM, pemerintah, dan pihak ketiga, serta mengoordinasikan berbagai kegiatan yang mendukung pertumbuhan UMKM. Kegiatan seperti pelatihan, pameran, dan pengembangan produk menunjukkan komitmen forum dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM. Selain itu, dukungan pendanaan dari pemerintah kalurahan dan kolaborasi dengan investor serta lembaga non-pemerintah memperkuat kapasitas UMKM untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Dengan demikian, keberadaan dan fungsi FORKOM UMKM tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

5. Pengambilan keputusan berdasarkan konsensus merupakan prinsip fundamental dalam penerapan *collaborative governance* untuk pengembangan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan dialog, negosiasi, dan musyawarah antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku UMKM, pemerintah kalurahan, dan Badan Perwakilan Kalurahan (BPKal), memastikan bahwa setiap suara didengar dan kebutuhan semua pihak dipertimbangkan. Meskipun belum ada Surat Keputusan (SK) resmi terkait UMKM, dukungan yang konsisten terhadap kegiatan UMKM, seperti pameran dan pelatihan, menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Proses koordinasi yang melibatkan semua pihak dalam rapat-rapat rutin menghasilkan keputusan yang bermanfaat dan disepakati bersama, yang kemudian disahkan oleh pemerintah kalurahan untuk menjadi kebijakan resmi. Dengan demikian, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus tidak hanya memperkuat kerjasama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, tetapi juga menciptakan legitimasi dan dukungan yang luas untuk inisiatif pengembangan UMKM, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan.

6. Kebijakan publik yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Keberadaan Peraturan Kalurahan (PERKAL) dan Surat Keputusan (SK) terkait kepengurusan UMKM memberikan dasar hukum yang jelas dan legitimasi bagi operasional UMKM, sehingga pelaku UMKM dapat menjalankan usaha mereka dengan aman dan terlindungi. Meskipun sebagian besar kegiatan UMKM telah berjalan dengan baik, terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap pasar agar dapat meningkatkan daya tarik produk dan

menarik lebih banyak konsumen. Dukungan dari Badan Perwakilan Kalurahan (BPKal) menunjukkan komitmen untuk memajukan kegiatan UMKM, dan melalui kerjasama yang kuat antara pelaku UMKM, pemerintah kalurahan, dan BPKal.

Penelitian mengenai *Collaborative Governance* dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Umbulharjo memberikan wawasan yang signifikan dalam perspektif ilmu pemerintahan, terutama terkait dengan peran institusi publik dan aktor non-pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah kalurahan, komunitas lokal, dan sektor swasta melalui Forum Komunikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (FORKOM UMKM) tidak hanya memperkuat kapasitas pelaku UMKM, tetapi juga menciptakan mekanisme partisipatif yang memungkinkan pengambilan keputusan berbasis konsensus. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip good governance, di mana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam pengembangan kebijakan publik yang efektif. Selain itu, dukungan kebijakan yang jelas dan legitimasi hukum melalui Peraturan Kalurahan dan Surat Keputusan terkait UMKM menunjukkan pentingnya kerangka regulasi yang mendukung operasional UMKM, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif dalam pemerintahan dapat menjadi strategi yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti ajukan antara lain:

1. Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi menjadi kunci penting dalam meningkatkan daya saing UMKM. Pemerintah kalurahan bersama dengan aktor non-pemerintah, seperti FORKOM UMKM, dapat memberikan pelatihan dan pendampingan mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam skala kecil kepada para pelaku UMKM. Dengan adopsi teknologi digital, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan visibilitas produk melalui *platform online*, serta memperluas akses pasar secara global. Kolaborasi antara UMKM dan ahli teknologi dalam rangka pengembangan *e-commerce* lokal juga dapat menjadi langkah strategis untuk membawa UMKM ke level berikutnya.
2. Untuk menjaga daya saing di pasar yang terus berubah, UMKM perlu terus melakukan inovasi serta diversifikasi produk. Institusi publik, aktor non-pemerintah, dan pelaku UMKM dapat bekerja sama dalam mengidentifikasi peluang pasar, tren konsumen, serta pengembangan produk baru. Melalui program inkubasi dan workshop inovasi, UMKM dapat diberikan ruang untuk menjelajahi ide-ide kreatif dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan adanya kerjasama yang solid, UMKM akan mampu berkembang secara berkelanjutan dan berperan sebagai penggerak ekonomi lokal.
3. Selain pendampingan teknis, penguatan kapasitas manajerial dan keuangan juga menjadi hal yang krusial dalam pengembangan UMKM. Institusi publik dan aktor non-pemerintah dapat menyediakan pelatihan mengenai manajemen bisnis, perencanaan keuangan, dan pemahaman pasar bagi para pelaku UMKM. Selain itu,

kerjasama dengan lembaga keuangan untuk memfasilitasi akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau juga dapat meningkatkan daya tahan UMKM terhadap perubahan ekonomi.

4. Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan UMKM untuk melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap program-program yang telah diimplementasikan. Institusi publik, aktor non-pemerintah, dan pelaku UMKM perlu bekerja sama dalam mengidentifikasi indikator keberhasilan, mengevaluasi dampak dari program yang telah dilaksanakan, serta melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas usaha pengembangan UMKM. Dengan adanya evaluasi dan monitoring yang komprehensif, dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan berdampak positif dan berkelanjutan bagi perkembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo.

DAFTAR PUSTAKA

- A., & W. (2021). product quality improvement and SMEs competitiveness. *journal of business and entrepreneurship*.
- Al Farisi, S. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 73-84.
- Al-Dawiyah, T., & Sugianto. (2023). Pengaruh Media Sosial, Kreativitas Dan Modal Usaha Terhadap Keberlanjutan Usaha Umkm Dalam Kerangka Maqashid Syariah. *Kabilah: Journal of Social Community*, 8(1), 472–489. <https://doi.org/10.36418/COVALUE.V11I1.1972>
- Aqshal Bagoes Avanzar Noegroho, & Arif, L. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Umkm Puduk Di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. *Journal Publicuho*, 5(4), 1405–1414. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.85>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Arimal, J. (2023). *Dinamika Governance*. 43-54.
- Astuti, R. W. (2020). Sampul Collaborative Governance. *Collaborative Govenance Dalam Perspekit Publik*, 161.
- Azis, I. &. (n.d.). tantangan pengembangan UMKM di Wilayah pedesaan di Indonesia. *ekonomi dan pembangunan*.
- Bakri, S. &. (n.d.). impact of merapi volcanic eruptions on community livelihood and economic recovery in sleman. *ilmu sosial indonesia*.
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). LURAH UMBULHARJO KABUPATEN SLEMAN PERATURAN KALURAHAN UMBULHARJO. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Creswell, J. W. (2014). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Depari, C. (2024). Pemetaan terhadap Resiliensi Pemukim Kawasan Rawan Bencana II Merapi Studi Kasus: Huntap Karang Kendal. *Jurnal Atma Inovasia*, 4(1), 1-6.
- Dewi, K. &. (n.d.). cultural and natural resource for sustainable development of local enterprises. *journal of rular and communiy development*.
- Dibyorini, M. C. (2024). Manifestasi Collaborative Governance: Mengorkestrasi Korporasi Rakyat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). *Islamic Management and Empowerment Journal*, 47-66.
- Emerson, K. N. (2012). an integrative framework for collaborative governance. *public administration research and theory*.
- Granovetter, M. (1973). The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology*, 78(6), 1360-1380.

- Habibah, E. N., Sos, S., & Rumah, P. P. (2021). *COLLABORATIVE GOVERNANCE: Konsep & Praktik dalam Pengelolaan Bank Sampah*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Hendratmoko, S. (2015). "Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Perekonomian Nasional". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(2), 123-135.
- Hendrawati. (2017). Jadi Media Pengembangan UMKM, Bupati Sleman Resmikan Program Satu Sama Bunda. *Jurnal Akuntansi*, 11.
- Hibbard, P. (2021). Collaborative Governance Performance: the Problem-Solving Court Context. September. <https://www.researchgate.net/publication/354556250>
- Hidayat, R. (2019). "E-commerce sebagai Solusi untuk UMKM di Era Digital". *Jurnal Teknologi dan Manajemen*, 4(2), 112-125.
- Hidayati, N. (2018). Pengaruh Pelatihan dan Pendidikan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(1), 45-60.
- Jong Tallo, A. (2019). PENERAPAN SISTEM INFORMASI DALAM IDENTIFIKASI SMELLSCAPE DI DESA WISATA PENTINGSARI (Implementation of System Information for Identification of Smellscape in Pentingsari Tourism Village). *Jurnal Sains Informasi Geografi*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.31314/jsig.v2i2.283>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). Laporan Tahunan Koperasi dan UMKM. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Mankiw, N. G. (2014). *Principles of Economics*. Cengage Learning.
- Marchel, R. (2019). starategic role of market access for SMEs development in Yogyakarta. *economic development* .
- Mintzberg, H. (2009). *Managing*. Berrett-Koehler Publishers.
- Noegroho, A. B. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Umkm Puduk Di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. *Journal Publicuho*, 1405-1414.
- Nugrahani, F. 2014. *Metode Penelitain Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Book
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Prasetyo, A. (2020). Peran Infrastruktur dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 9(2), 123-135.
- Prasetyo, E. (2021). "Peluang dan Tantangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 145-160.
- Purwanti, E. &. (2020). Collaborative governance and community empowerment in rural development. *administrasi publik indonesia*.

- Putnam, R. (. (n.d.). making democracy work:civic tradition in modern italy. princeton university press.
- Putra, H. &. (2018). Collaborative for sustainable development in rural areas. development jurnal.
- Salindri, Y. A., Sulisty, A., Annisa, R. N., Hadiano, F., & Arifkusuma, M. B. (2022). Pemberdayaan UKM YAD Blangkon Yogyakarta Melalui Pemasaran Berbasis Digital Sebagai Upaya Menembus Pasar Global. Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 1(4), 41–46. <https://doi.org/10.26714/jipmi.v1i4.62>
- Sandhi, R. (2020). building competitive advantage in SMEs through collaborative governance. economic and community development.
- Sari, R. A., & Rahardjo, B. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 4(1), 15-25.
- Satria, M. &. (n.d.). peran BUM Desa dalam mendukung UMKM berbasis wisata lokal. jurnal kebijakan dan pemberdayaan masyarakat.
- Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Elfabeta
- Sukirno, S. (2015). Teori Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryani, D. &. (n.d.). collaborative governance in strengthening small and medium enterorise: A Case Study in Yogyakarta. governance and public policy.Akasse, C. S., & Ramansyah, R. (2023). Strategi Promosi Pariwisata melalui Media Sosial dalam Meningkatkan Pengunjung di Desa Wisata. Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, 10(1), 52–60. <https://doi.org/10.24036/scs.v10i1.457>
- Tarigan, M. H., Suwaryo, U., & Rahmatunnisa, M. (2023). Collaborative Governance in Management of Village Funds. Russian Law Journal, 11(5), 1257–1268.

LAMPIRAN

Interview Guide (Panduan Wawancara)

Nama Informan :

Jabatan/Pekerjaan :

Usia :

Tingkat Pendidikan :

Jenias Kelamin :

Tanggal Wawancara :

-
1. Inisiasi institusi publik dalam pengembangan UMKM,
 - a. Apa peran lurah dalam inisiasi program pengembangan UMKM di wilayah Kalurahan Umbulharjo?
 - b. Bagaimana bentuk kerja sama antara institusi publik dalam pengembangan UMKM?
 - c. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam inisiasi program UMKM di Kalurahan Umbulharjo?
 2. Keterlibatan aktor non pemerintah dalam pengembangan UMKM,
 - a. Siapa saja aktor non-pemerintah yang terlibat dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo?
 - b. Bagaimana peran serta kontribusi aktor non-pemerintah dalam program pengembangan UMKM?
 - c. Apa saja yang membuat peran organisasi atau individu dianggap signifikan dalam mendukung UMKN di Kalurahan Umbulharjo?
 3. Partisipasi langsung dalam pengembangan UMKM,
 - a. Bagaimana masyarakat atau kelompok lokal dilibatkan dalam pengembangan UMKM ?

- b. Apa saja bentuk partisipasi yang paling umum dilakukan oleh masyarakat dalam pengembangan UMKM?
 - c. Apa saja hambatan dalam meningkatkan partisipasi langsung terhadap masyarakat lokal?
- 4. Organisasi forum yang formal dalam pengembangan UMKM,
 - a. Bagaimana peran organisasi atau forum formal yang dibentuk untuk mendukung pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo?
 - b. Bagaimana cara organisasi atau forum tersebut berkolaborasi dengan pemerintah dalam pengembangan UMKM?
 - c. Bagaimana forum tersebut berkontribusi dalam menyelesaikan masalah UMKM di Kalurahan Umbulharjo?
- 5. Pengambilan keputusan berdasarkan konsensus dalam pengembangan UMKM,
 - a. Bagaimana cara organisasi atau forum tersebut berkolaborasi dengan pemerintah dalam pengembangan UMKM?
 - b. Bagaimana proses pengambilan keputusan terkait program pengembangan UMKM dilakukan di Kalurahan Umbulharjo?
 - c. Mengapa konsensus tersebut menjadi prinsip utama dalam pengambilan keputusan?
- 6. Fokus pada kebijakan publik dalam pengembangan UMKM .
 - a. Apa saja kebijakan publik yang ada untuk mendukung pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo?
 - b. Bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di tingkat Kalurahan Umbulharjo?
 - c. Apa saja kebijakan yang dianggap perlu di perbaiki atau di usulkan untuk lebih mendukung UMKM di kalurahan Umbulharjo?

Dokumentasi



Wawancara bersama Pak Danang (Lurah) dan Pak Suranta (Carik)
Pada tanggal 10 Januari 2025



Wawancara bersama Pak Sugeng selaku Ulu-Ulu
Pada tanggal 10 Januari 2025



Wawancara bersama Ibu Dian selaku Sekretaris BPKal
Pada tanggal 10 Januari 2025



Wawancara bersama Pak Anton selaku Ketua FORKOM
Pada tanggal 17 Januari 2025



Wawancara bersama Pak Yoga selaku Pelaku UMKM
Pada tanggal 17 Januari 2025